Walikota dan
Wakil Walikota Payakumbuh

Lampiran
Surat Keputusan Wali Kota Payakumbuh
Nomor: 500.1.1/20.10.866/WK-PYK/2025
Tentang Peta Ketahanan Pangan
Kota Payakumbuh Tahun 2025

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN

FOOD SECURITY AND
VULNERABILITY ATLAS - FSVA

DINAS KETAHANAN PANGAN

2025

SAMBUTAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

Begitu pentingnya permasalahan pangan untuk kita tuntaskan secara bersama sama serta mendorong kita untuk berusaha mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sehingga mampu dan dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan sampai ke tingkat perseorangan.

Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Payakumbuh yang kuat, tentu diperlukan informasi Ketahanan Pangan yang akurat dan tertata dengan baik. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pemerintah Kota Payakumbuh terus berupaya dalam melaksanakan Pembangunan ekonomi daerah yang tangguh dan berkeadilan dengan sasaran menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta mendukung peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi ini diharapkan peran serta seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, serta diharapkan dapat secara efektif menangani permasalahannya dan prioritas penanganan sebagaimana dituangkan dalam buku ini.

Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan *(Food Security and Vulnerability Atlas* / FSVA) menyediakan analisis yang dapat dijadikan acuan bagi pengambil keputusan dalam perencanaan

program dan kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi. Keberadaan Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* / FSVA) Kota Payakumbuh ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam menangani Kerentanan Pangan di Kota Payakumbuh.

Kami mengucapkan terima kasih atas tersusunnya Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* / FSVA) Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua. Aamiin Yaa Robbal Alamin.

Payakumbuh, Desember 2025

WALIKOTA PAYAKUMBUH

ZULMAETA

KATA PENGANTAR

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh (*Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA)* dibuat dalam suatu tatanan kesamaan yang sangat baik antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Payakumbuh dan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

Peta ini menyajikan informasi tentang kondisi ketahanan dan kerentanan pangan sampai pada tingkat kelurahan di Kota Payakumbuh yang digambarkan dalam 3 dimensi yaitu Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, dan Pemanfaatan Pangan. Peta ini juga menyajikan analisis mengenai kerentanan terhadap bencana alam untuk kesiapsiagaan bencana yang lebih baik, rekomendasi dan strategi penanganan kerawanan pangan.

Besar harapan kami peta ini dapat membawa suatu perubahan yang berarti dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi oleh seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah dan swasta serta Upaya-upaya penanganan masalah ketahanan pangan dan gizi melalui koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Payakumbuh, diharapkan dapat secara efektif menangani permasalahan dan prioritas penanganan sebagaimana dituangkan dalam peta ini.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025, atas dukungan dan kerjasama yang intensif dalam upaya penyusunannya sehingga peta ini dapat diluncurkan. Pada akhirnya kami berharap peta ini dapat

bermanfaat demi tercapainya kondisi ketahanan pangan dan gizi di Kota Payakumbuh yang lebih baik, dan saran untuk penyempurnaannya sangat kami perlukan.

Payakumbuh, Desember 2025
Dinas Ketahanan Pangan
Kota Payakumbuh

EDWIDEL ARDA, S.IP, MM
NIP. 19700124 199003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FSVA)
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

TIM PENYUSUN

No.	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Edvidel Arda, S.IP, MM/ 197001241990031001/ IV.c	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	
2	Roza Aulia, S.STP, M.Si/ 198111282000122002/ IV.b	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	
3	Amiruddin,S.Sos, MM/ 197811172007011004/ III.d	Kepala Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan	
4	Henda Eriko, SH/ 197311272005011005/ IV.a	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial Dinas Sosial	
5	Hella Citra, SST, M.Si/ 198707172009122003/ III.d	Statistisi Muda Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh	
6	Despriyani, STr.Keb/ 196910181989032001/ IV.a	Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan	
7	Junaidi, S.Kom, M.Si/ 198406242010011018/ III.c	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda	
8	Davit Putra, ST, M.Eng/ 198310032009011002/ III.d	Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas PUPR	
9	Hendri, SP/ 197709142011011003/ III.d	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan	
10	Vinna Agustia, SP/ 199408022024212049/ IX	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama Dinas Ketahanan Pangan	

11	Indah Lovesianda, SKM/ 198806012011012008/ III.d	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan	
12	Lily Rachma Diana, S.TP/ 198306082005012006/ III.d	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan	
13	Yanti Deswita, SP/ 197512012024212008/ IX	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama Dinas Ketahanan Pangan	
14	Zhoraiya Mukhlisa, A.Md/ 198509262010012008/ III.b	Pengolah Data Dinas Ketahanan Pangan	
15	Erni Yunita, SP/ 198501052025212006/ IX	Penata Layanan Operasional Dinas Ketahanan Pangan	

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan dan PP No 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

3. FSVA Kota merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah kelurahan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kelurahan. 5 (lima) indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kota.

4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio

penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Kelurahan dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.

5. Kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan priroritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis FSVA 2025 menunjukkan bahwa kelurahan rentan pangan Prioritas 3 sebanyak 6 kelurahan dari 47 kelurahan (12,77%), prioritas 4 sebanyak 30 kelurahan (63,83%) dan prioritas 5 sebanyak 11 kelurahan (24,40%).

   Kelurahan Prioritas 3 tersebar pada 6 kelurahan di 4 kecamatan yaitu Kelurahan Talang di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Balai Jariang di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kelurahan Napar, Kelurahan Taratak Padang Kampuang, dan Kelurahan Tigo Koto Diate di Kecamatan Payakumbuh Utara, dan Kelurahan Parambahan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

   Karakteristik kelurahan rentan pangan ditandai dengan :

   1 Ratio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk. Berwarna merah tua

   2 Ratio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga berwarna merah

   3 Ratio jumlah penduduk kelurahan pertenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk berwarna merah muda

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan kelurahan diarahkan pada kegiatan:

a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/ UMKM untuk menggerakan ekonomi wilayah
b. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan
c. Penyediaan tenaga kesehatan

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kota diarahkan pada kegiatan:

a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan
c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
d. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kecamatan
e. Penanganan Kerawanan Pangan kewenangan Kabupaten/Kota
f. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

DAFTAR ISI

		HAL
SAMBUTAN WALI KOTA PAYAKUMBUH…	.....	**i**
KATA PENGANTAR…	.....	**iii**
LEMBAR PENGESAHAN	.....	**v**
RINGKASAN EKSEKUTIF	.....	**vii**
DAFTAR ISI	.....	**x**
DAFTAR TABEL	.....	**xii**
DAFTAR GAMBAR	.....	**xiv**
BAB 1 PENDAHULUAN	.....	**1**
1.1 Dasar Pemikiran dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	.....	4
1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	.....	5
1.3 Metodologi	.....	7
1.4 Metode Analisis	.....	13
1.5 Pemetaan	.....	15
BAB 2 ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
2.1 Luas Lahan dan Produksi	.....	17
2.2 Jumlah Prasarana dan Sarana Penyedia Pangan	.....	18
2.3 Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	.....	22
BAB 3 ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN	.....	**24**
3.1 Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah	.....	25
3.2 Akses Penghubung	.....	35
3.3 Strategi Peningkatan Keterjangkauan Pangan	.....	39
BAB 4 ASPEK PEMANFAATAN PANGAN	.....	**41**
4.1 Akses Terhadap Air Bersih	.....	42
4.2 Akses Terhadap Tenaga Kesehatan	.....	43
4.3 Dampak dari Status Kesehatan	.....	45

BAB 5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT 47

5.1 Kondisi Ketahanan Pangan 48

5.2 Faktor Penyebab Kerentanan Pangan 50

BAB 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN 52

6.1 Kesimpulan 52

DAFTAR PUSTAKA 59

LAMPIRAN 60

DAFTAR TABEL

HAL

1.1 Indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Payakumbuh, 2024 8

1.2 Bobot Indikator Individu..... 14

2.1 Data Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Kelurahan 19

2.2 Sebaran Rasio Sarana Dan Prasarana Ekonomi Pangan Berdasarkan Prioritas 20

3.1 Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk 26

3.2 Jumlah Unit Usaha Dan Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap 27

3.3 Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja 28

3.4 Sebaran Pekerjaan Penduduk..... 29

3.5 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan 29

3.6 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2016-2024..... 32

3.7 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Sumatera Barat, 2023-2024 33

3.8 Jumlah Penduduk Miskin Kota Payakumbuh, 2023-2024 33

3.9 Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 Dan Jumlah Penduduk Tahun 2024 dan 2025 Di Masing-Masing Kelurahan Di Kota Payakumbuh..... 33

3.10 Sebaran Kelurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas 35

3.11 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Dan Pemerintah Yang Berwenang Di Kota Payakumbuh 36

3.12 Panjang Jalan Menurut Kecamatan Dan Kondisi Jalan Di Kota Payakumbuh 37

3.13 Panjang Jalan Menurut Kecamatan Dan Pemerintah Yang Mengelola Di Kota Payakumbuh Tahun 2024 37

3.14 Data Panjang Jalan Kota Dan Tingkat Aksebilitas 38

4.1 Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih 42

4.2 Jumlah Tenaga Kesehatan 44

4.3 Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan Di Desa Berdasarkan Skala Prioritas 45

4.4 Penderita Gizi Buruk 2020-2024 45

4.5 Jumlah Kematian Balita Dan Ibu Melahirkan Per Kecamatan 46

5.1 Hasil Komposit Ketahanan Pangan Berdasarkan Skala Prioritas 49

GAMBAR

HAL

1.1 Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan Dan Gizi 6

2.1 Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Indikator Ketersediaan Jumlah Sarana Dan Prasarana Penyedia Pangan..... 21

3.1 Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Indikator Jumlah Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah 35

3.2 Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Indikator Akses Pangan Kelurahan Tanpa Akses Penghubung Memadai 39

4.1 Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Indikator Pemanfaatan Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih 43

4.2 Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Indikator Jumlah Tenaga Kesehatan..... 44

5.1 Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025 50

5.2 Komposit Ketahanan Pangan 51

BAB 1
PENDAHULUAN

Kota Payakumbuh merupakan salah satu dari tujuh kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, kota ini terletak antara 100˚35’–100˚45’ Bujur Timur dan memanjang dari barat ke timur pada koordinat 00˚10’–00˚17’’ Lintang Selatan, dengan ketinggian sekitar 514 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan letak geografisnya, seluruh wilayah Kota Payakumbuh berbatasan langsung dengan Kabupaten Lima Puluh Kota. Di bagian utara, berbatasan dengan Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh; di selatan dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari; di barat dengan Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru; serta di timur berbatasan dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Harau.

Luas wilayah daratan Kota Payakumbuh mencapai 8.043,13 km² atau sekitar 80,43 hektare. Dari sisi klimatologis, kota ini termasuk daerah dengan curah hujan sedang, di mana wilayah basah memiliki curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun, sedangkan wilayah kering kurang dari 2.000 mm per tahun. Secara administratif, Kota Payakumbuh terdiri atas lima kecamatan, yaitu Payakumbuh

Barat, Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Timur, Payakumbuh Utara dan Lamposi Tigo Nagori. Kecamatan Payakumbuh Barat merupakan wilayah terluas dengan luas 19,06 km² atau 23,7 persen dari total wilayah kota, sementara Kecamatan Lamposi Tigo Nagori menjadi yang terkecil dengan luas 9,43 km² atau 11,72 persen (BPS, 2024).

Struktur PDRB Kota Payakumbuh periode 2022–2024 menunjukkan kestabilan yang relatif konsisten, dengan sektor perdagangan besar dan eceran tetap menjadi penyumbang terbesar sekitar 25 persen. Sektor konstruksi menempati posisi kedua dengan kontribusi sekitar 13–14 persen, disusul oleh sektor transportasi dan pergudangan yang memberikan andil lebih dari 11 persen. Sementara itu, sektor pertanian menunjukkan tren penurunan, sedangkan sektor informasi dan komunikasi serta jasa pemerintahan tetap menjadi penopang utama perekonomian daerah.

Nilai PDRB Kota Payakumbuh atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,229 triliun rupiah, meningkat dari 5,002 triliun rupiah pada tahun 2023. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha, seiring dengan pulihnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2024, tiga sektor utama yang masih menjadi pilar perekonomian Kota Payakumbuh adalah perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi 25,02 persen, konstruksi sebesar 13,64 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 11,82 persen. Ketiga sektor ini konsisten mendominasi struktur ekonomi kota, meskipun sektor perdagangan mengalami sedikit penurunan dari 25,12 persen pada 2022, dan transportasi juga menurun dari puncaknya sebesar 12,16 persen pada 2023.

Di sisi lain, sektor dengan kontribusi paling kecil masih ditempati oleh pengadaan listrik dan gas (0,05 persen), jasa perusahaan (0,23 persen), serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (0,23 persen), tanpa perubahan signifikan sejak 2022. Secara keseluruhan, komposisi PDRB tahun 2024 mempertegas dominasi sektor jasa dan perdagangan, dengan sektor-sektor kecil yang relatif stagnan dan sektor primer seperti pertanian yang terus mengalami penurunan peran (BPS, 2024 — Kota Payakumbuh Dalam Angka).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh pada tahun 2024 mencapai angka 80,76, menempatkannya sebagai yang tertinggi ketiga di Provinsi Sumatera Barat, setelah Kota Padang (84,38) dan Kota Bukittinggi (82,61).

Sementara itu, IPM terendah di provinsi ini masih ditempati oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai 66,67 (BPS, Indikator Strategis Kota Payakumbuh 2024/2025).

Meskipun capaian IPM tersebut tergolong tinggi, masih terdapat sejumlah indikator yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Millennium Development Goals (MDGs), antara lain:

1. Kemiskinan. Dengan garis kemiskinan sebesar Rp573.234 per kapita per bulan pada tahun 2024, tercatat sebanyak 7,62 ribu jiwa penduduk Kota Payakumbuh hidup di bawah garis kemiskinan, setara dengan 5,19 persen dari total penduduk. Indeks kedalaman kemiskinan tercatat 0,74 poin, sedangkan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,15 poin (BPS, 2024).
2. Kesenjangan pendapatan. Tingkat ketimpangan antarpenduduk masih tergolong tinggi, ditunjukkan oleh kenaikan koefisien gini menjadi 0,313 pada tahun 2024 (BPS, 2024).
3. Kesehatan ibu. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Payakumbuh masih menunjukkan adanya kasus, yaitu dua kejadian selama tahun 2024, meningkat dibandingkan satu kasus pada tahun sebelumnya (BPS, 2024).

Selain indikator sosial tersebut, peningkatan produktivitas daerah juga erat kaitannya dengan kondisi infrastruktur. Pada tahun 2024, Kota Payakumbuh memiliki jaringan jalan sepanjang 295,382 km, dengan rincian: 196,842 km berstatus baik, 43,007 km berstatus sedang, 46,830 km dalam kondisi rusak, dan 8,703 km tergolong rusak berat (BPS, 2024).

Salah satu urusan wajib yang diemban Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan ketahanan pangan. Ketahanan pangan daerah merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai kepada perseorangan, ini dicerminkan dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sebagai daerah perkotaan yang padat penduduk dan kebutuhan pangan yang tinggi maka ketahanan pangan dan gizi di Kota Payakumbuh harus terus menjadi perhatian utama.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA tahun 2025 sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah.

1.1 Dasar Pemikiran dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk menjadi acuan bagi para pembuat keputusan dalam penentuan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagai instrumen untuk pemantauan ketahanan pangan wilayah. Peta ketahanan dan kerentanan pangan Nasional disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan World Food Programme (WFP). Kerja sama tersebut telah menghasilkan peta kerawanan pangan (food insecurity atlas) pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2009 diluncurkan peta ketahanan dan kerentanan pangan, selanjutnya sejak tahun 2018 peta ketahanan dan kerentanan pangan dilakukan pembaharuan setiap tahun. Sebagai tindak lanjut penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Nasional disusun peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten/Kota dengan analisis sampai tingkat Kelurahan.

Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. Peta ketahanan dan kerentanan pangan selanjutnya dimanfaatkan dan digunakan untuk: (1) dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan, dan (2) penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang Pangan. Dengan adanya perubahan kelembagaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, mulai tahun 2022 supervisi penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Sebagai dasar pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan telah terbit Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peraturan tersebut memberikan arahan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan pangan.

Pemutakhiran yang dilakukan Badan Pangan Nasional dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain: (1) pemutakhiran form analisis, (2) perbaikan definisi indikator, (3) perluasan sumber data indikator, dan (4) teknik pemetaan. Dengan demikian, diharapkan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten/Kota dapat lebih tepat dan akurat sesuai dengan kondisi aktual ketahanan pangan wilayah.

1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Kerangka konseptual Ketahanan Pangan dalam penyusunan FSVA 2024 (Gambar 1) dibangun berdasarkan 3 (tiga) pilar Ketahanan Pangan: Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan dan Pemanfaatan Pangan, serta mengintegrasikan gizi dan keamanan Pangan di dalam keseluruhan pilar tersebut. Pilar **Ketersediaan Pangan** didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan Pangan nasional, dan impor Pangan.

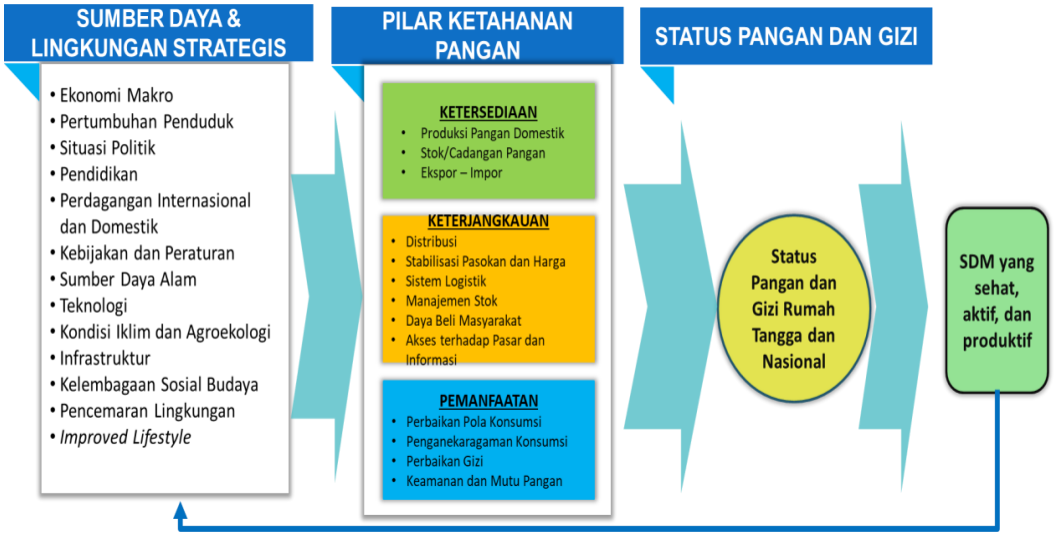

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi

Pilar **keterjangkauan Pangan** didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup Pangan yang bergizi, melalui 1 (satu) atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, *barter*, hadiah, pinjaman dan bantuan Pangan. Dalam kerangka Ketahanan Pangan, keterjangkauan menjadi penting karena Pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu wilayah bisa jadi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan fisik, ekonomi atau sosial.

Pilar **pemanfaatan pangan** merujuk pada penggunaan Pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan Pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan keamanan makanan dan minuman, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk mengukur pemanfaatan Pangan rumah tangga.

Untuk mendukung berjalannya ketiga pilar tersebut diperlukan sumber daya dan lingkungan strategis di antaranya situasi politik dan ekonomi makro yang kondusif, perdagangan internasional dan domestik yang berkeadilan bagi produsen dan konsumen, ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan,

kondisi iklim dan agroekologi serta ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang mendukung peningkatan produksi Pangan. Memadainya sumber daya dan lingkungan strategis akan memudahkan kinerja ketiga pilar Ketahanan Pangan untuk mewujudkan tujuan akhirnya yaitu meningkatnya status Pangan dan gizi rumah tangga maupun nasional. Status Pangan dan gizi rumah tangga dan nasional tercermin dari sumber daya manusianya yang dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

1.3 Metodologi

Kerentanan Pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah Ketahanan Pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan beberapa indikator ke dalam 3 (tiga) kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan dan Pemanfaatan Pangan. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan Pangan bergizi, tersebar di dalam 3 (tiga) kelompok tersebut.

Kerentanan terhadap kerawanan Pangan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota memiliki karakteristiknya masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan Pangan di tingkat kabupaten/kota. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan wilayah rentan rawan Pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi Ketahanan Pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar Ketahanan Pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data di tingkat Kelurahan/kelurahan. Dengan pertimbangan tersebut, maka indikator yang digunakan dalam FSVA Pemerintah Daerah Kabupaten sebanyak 6 (enam) indikator dan FSVA Pemerintah Daerah Kota sebanyak 5 (lima) indikator yang mencerminkan 3 (tiga) aspek Ketahanan Pangan. Indikator luas lahan pertanian tidak digunakan dalam analisis komposit FSVA Kota.

Tabel 1.1
Indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Payakumbuh , 2024

Aspek	Indikator
Ketersediaan Pangan	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk
	Rasio jumlah prasarana dan sarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga
Keterjangkauan Pangan	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk
	Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai darat, air atau udara
Pemanfaatan Pangan	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga
	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk

1.3.1 Ketersediaan Pangan

Definisi Ketersediaan Pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah kondisi tersedianya Pangan hasil produksi dalam negeri, cadangan Pangan nasional, dan impor Pangan.

Ketersediaan Pangan ditentukan oleh produksi Pangan di wilayah tersebut, perdagangan Pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan Pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi Pangan, keberadaan prasarana dan sarana penyedia Pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan Pangan di suatu wilayah. Untuk menggambarkan situasi ketersediaan Pangan dalam penyusunan FSVA Kabupaten, maka indikator yang digunakan adalah: (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; dan (2) Rasio jumlah prasarana dan sarana penyedia Pangan terhadap jumlah rumah tangga. Sedangkan dalam penyusunan FSVA Kota, indikator rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk tidak digunakan dalam analisis komposit.

a. Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian (sawah, ladang, pekarangan, kebun, lahan perikanan budidaya, dan lainnya) penghasil Pangan (produktif) dengan jumlah penduduk. Lahan pertanian memiliki nilai manfaat penggunaan (*use value*) yang didapat dari hasil kegiatan usaha tani yang dilakukan pada lahan tersebut.

Rasio lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan Pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan Pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi Pangan. Luas lahan pertanian dapat mengacu pada luasan tanam di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan Pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah tersebut juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya. Indikator luas lahan pertanian tidak digunakan dalam analisis komposit Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota.

b. Rasio Jumlah Prasarana dan Sarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Rasio jumlah prasarana dan sarana penyedia Pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah prasarana dan sarana penyedia Pangan dengan jumlah rumah tangga di Kelurahan.

Prasarana dan sarana penyedia Pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan Pangan (stok Pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen Pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio prasarana dan sarana penyedia Pangan terhadap jumlah rumah tangga di Kelurahan maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan Pangan di Kelurahan tersebut. Rendahnya kualitas infrastruktur, terbatasnya akses terhadap aset produktif, terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi produktif merupakan penyebab kemiskinan dan kerawanan Pangan.

Indikator prasarana dan sarana penyedia Pangan digunakan sebagai indikator yang melengkapi indikator sebelumnya karena bisa jadi suatu wilayah Kelurahan tidak memiliki potensi untuk memproduksi Pangan sendiri, namun Kelurahan tersebut memiliki prasarana dan sarana penyedia Pangan sehingga ketersediaan Pangan di

Kelurahan tersebut masih dapat mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Prasarana dan sarana penyedia Pangan antara lain:

1) pasar dengan bangunan permanen (memiliki atap, lantai, dan dinding);
2) pasar dengan bangunan semi permanen (memiliki atap dan lantai, tanpa dinding);
3) pasar tanpa bangunan (misalnya: pasar subuh, pasar terapung, dll.);
4) jumlah minimarket/swalayan (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan label harga, sistem pelayanan mandiri, luas lantai < 400 m2 (kurang dari empat ratus meter persegi);
5) toko/warung kelontong (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang keperluan sehari–hari secara eceran, tanpa ada sistem pelayanan mandiri);
6) toko/warung kelontong yang menjual bahan Pangan (sembako);
7) warung/kedai makanan minuman (usaha Pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya tidak dikenai pajak);
8) restoran/rumah makan (usaha Pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya dikenai pajak);
9) kelompok pertokoan (minimal 10 (sepuluh) toko dan mengelompok dalam satu lokasi);
10) hotel (menyediakan jasa akomodasi dan ada restoran, penginapan dengan izin usaha sebagai hotel);
11) penginapan: hostel / motel / losmen / wisma (menyediakan akomodasi, penginapan dengan izin usaha bukan sebagai hotel); dan
12) lumbung Pangan, gudang, penggilingan, usaha mikro dan kecil dan menengah, dan sarana penyedia Pangan lainnya.

1.3.2 Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, *barter*, hadiah, pinjaman dan bantuan Pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli Pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber Pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses Pangan, seperti *barter*, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA

Kabupaten/Kota,indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan Pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk Kelurahan; dan (2) Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

a. Rasio Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk Kelurahan

Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk Kelurahan adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah dengan jumlah penduduk Kelurahan.

Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah diasumsikan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk mengakses Pangan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi status kerawanan Pangan. Kemiskinan merupakan penyebab Kerentanan Pangan wilayah.

b. Kelurahan yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Melalui Darat, Air Atau Udara

Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan mempertimbangkan prasarana dan sarana transportasi darat, air, atau udara. Kriteria akses penghubung yang digunakan meliputi: (1) dapat dilalui sepanjang tahun; (2) dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll); (3) dapat dilalui selama musim kemarau; (4) tidak dapat dilalui sepanjang tahun.

Terdapat hubungan antara infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi dengan Ketahanan Pangan. Masyarakat yang tinggal di wilayah terisolir atau terpencil tanpa sarana penghubung yang memadai dapat menimbulkan “kemiskinan lokal” karena mereka kurang memiliki akses ke pelayanan jasa secara maksimal, termasuk dalam memperoleh Pangan.

1.3.3 Pemanfaatan Pangan

Aspek ketiga dari konsep Ketahanan Pangan adalah pemanfaatan Pangan. Pemanfaatan Pangan meliputi: (1) Pemanfaatan Pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien

oleh tubuh. Pemanfaatan Pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis Pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten/Kota, aspek pemanfaatan Pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk Kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

a. Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga tanpa akses ke air bersih dengan jumlah rumah tangga di Kelurahan. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air isi ulang, leding/PAM, sumur bor/pompa air, sumur terlindung serta mata air yang terlindung dengan memperhatikan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat minimal 10 m (sepuluh meter).

Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian Ketahanan Pangan. Air yang tidak bersih akan meningkatkan angka kesakitan dan menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan dan pada akhirnya akan mempengaruhi status nutrisi seseorang. Semakin besar rasio rumah tangga tanpa akses air bersih diduga akan berpengaruh terhadap Kerentanan Pangan wilayah. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu. Daerah yang akses terhadap air bersihnya rendah maka ditemukan kejadian malnutrisi yang tinggi pula.

b. Rasio Jumlah Penduduk Kelurahan Per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk

Rasio jumlah penduduk Kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk Kelurahan per tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, pranata laboratorium,

ahli gizi, sanitarian, sarjana kesehatan masyarakat, asisten apoteker, perawat gigi, pelaksana kesehatan, penata rontgen, dan tenaga kesehatan lainnya) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang berPayakumbuh bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk Kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah Kelurahan untuk melayani masyarakat. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat Kerentanan Pangan.

1.4. Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Gobal Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)

b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^{9} a_i X_{ij} \quad \text{..... (1)}$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2
Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
I	**Aspek Ketersedian Pangan**	**1/3**
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah Kelurahan	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
II	**Aspek Keterjangkauan Pangan**	**1/3**
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk Kelurahan	1/6
4.	Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
III	**Aspek Pemanfaatan Pangan**	**1/3**
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga Kelurahan	1/6
6	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk Kelurahan	1/6

c. Mengelompokan Kelurahan/kelurahan ke dalam 6 (enam) kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* 0-100 (nol sampai seratus), dengan rumus:

$$K(j) = \sum_{n=1}^{9} a_i C_{ij} \quad \text{..... (2)}$$

Dimana:
K_j : *cut off point* komposit ke-J
a_i : Bobot indikator ke-i
C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 (satu) adalah Kelurahan/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dari pada Kelurahan/kelurahan dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 (enam) merupakan Kelurahan/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah Kelurahan/kelurahan yang diidentifikasikan sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di Kelurahan/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

1.5. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna se Payakumbuh dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN

ketersediaan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah kondisi tersedianya Pangan hasil produksi dalam negeri, cadangan Pangan nasional, dan impor Pangan.

Ketersediaan Pangan ditentukan oleh produksi Pangan di wilayah tersebut, perdagangan Pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan Pangan dari pemerintah atau organisasi lain. Mayoritas bahan Pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi Pangan, keberadaan prasarana dan sarana penyedia Pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan Pangan di suatu wilayah. Untuk menggambarkan situasi ketersediaan Pangan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota, maka indikator yang digunakan adalah: (1) Rasio jumlah prasarana

dan sarana penyedia Pangan terhadap jumlah rumah tangga.

Mengingat sebagian besar bahan pangan yang diproduksi maupun diimpor harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga, maka infrastruktur pasar, distribusi dan perdagangan akan terkait erat dengan ketersediaan pada tingkat regional dan lokal. Kota Payakumbuh memiliki 5 kecamatan dan 47 kelurahan, kelancaran distribusi merupakan tantangan tersendiri di Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh telah memiliki dukungan transportasi yang cukup memadai, untuk menghubungkan Kota Payakumbuh dengan provinsi atau daerah-daerah lain di Pulau Sumatera.

2.1 Luas Lahan dan Produksi

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian (sawah, ladang, pekarangan, kebun, lahan perikanan budidaya dan lain) penghasil Pangan (produktif) dengan jumlah penduduk. Lahan pertanian memiliki nilai manfaat penggunaan (use value) yang didapat dari hasil kegiatan usaha tani yang dilakukan pada lahan tersebut (Sumaryanto dan Tahlim, 2005). Rasio lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan Pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan Pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi Pangan (Yudhistira dkk, 2013). Luas lahan pertanian dapat mengacu pada luasan tanam di wilayah tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk diasumsikan ketersediaan Pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah tersebut juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Hortikultura

Produksi sayuran di Kota Payakumbuh tahun 2024 didominasi oleh kacang panjang, cabai, terung, ketimun, kangkung, dan buncis. Jika dilihat dari luas panen terbesar yaitu sayuran bayam yaitu 141,00 Ha. Produksi sayuran terbesar yaitu sayuran jenis Terung dengan produksi sebesar 16.557,95 kwintal. Jika dilihat dari jumlah tanaman yang menghasilkan buah-buahan, pohon pepaya adalah tanaman yang menghasilkan buah paling banyak, dengan produksi sebesar 43.593,25 Kwintal. Hal tersebut tergambar dalam table berikut ini:

Perkebunan

Tanaman perkebunan yang ditanami di Kota Payakumbuh pada tahun 2024 yaitu tebu, pinang, kopi, cengkeh, kelapa, kulit manis, gardamunggu, aren, coklat, dan karet. Dilihat dari luas tanam tanaman, luas tanam terluas kakao 454,70 ha yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Payakumbuh. Jika dilihat dari produksi tanaman paling banyak yaitu tanaman kelapa dengan produksi 635,15 ton.

Tanaman Pangan

Luas lahan sawah di Kota Payakumbuh pada tahun 2024 yaitu seluas 2.758,44 hektar. Luas lahan sawah ini terbagi atas 2, yaitu luas lahan sawah irigasi (2.613,46 hektar) dan luas sawah non irigasi (144,98 hektar). Luas lahan sawah irigasi terbesar terdapat di Kecamatan Payakumbuh Timur seluas 827,56 hektar dan luas lahan sawah irigasi terkecil di Kecamatan Lamposi Tigo Nagari seluas 377,42 hektar. Sedangkan luas lahan sawah non irigasi terbesar terdapat di Kecamatan Payakumbuh Timur seluas 54,00 hektar. Luas lahan pertanian bukan sawah Kota Payakumbuh tahun 2024 seluas 1.282,05 hektar dengan 1.209,30 hektar luas tegal/kebun, kemudian 28 hektar luas ladang/ huma, serta 44,75 hektar luas lahan yang sementara tidak diusahakan. Jagung dan ubi kayu merupakan jenis palawija yang paling diminati oleh masyarakat di Kota Payakumbuh. Hal ini dikarenakan banyaknya industri makanan yang berhubungan dengan 2 jenis palawija tersebut. Dari segi luas, luas lahan yang ditanami jagung lebih luas dibandingkan ubi kayu yaitu masing-masing 400,50 hektar dan 133,5 hektar.

2.2 Jumlah Prasarana dan Sarana Penyedia Pangan

Rasio jumlah sarana dan prasarana khusus penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di kelurahan. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di kelurahan maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di kelurahan tersebut.

Tabel 2.1
Data Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Kelurahan

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	Rasio jumlah sarana dan Prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga
1	**Payakumbuh Barat**	Pakan Sinayan	58	0,0976
2		Kubu Gadang	57	0,0670
3		Bulakan Balai Kandi	58	0,0432
4		Payolansek	72	0,0504
5		Talang	41	0,0421
6		Padang Tinggi Piliang	53	0,0414
7		Koto Tangah	42	0,0545
8		Subarang Batuang	31	0,0494
9		Parik Rantang	109	0,0649
10		Parak Batuang	43	0,1299
11		Nunang Daya Bangun	84	0,0708
12		Labuah Basilang	47	0,0693
13		Ibuah	335	0,2157
14		Tanjuang Pauh	46	0,0388
15		Tanjuanggodang Sungaipinago	141	0,1212
16		Padangtongah Balainanduo	85	0,0932
17		Padangdata Tanahmati	56	0,0607
18	**Payakumbuh Selatan**	Padang Karambia	44	0,0885
19		Kototuo Limokampuang	26	0.0650
20		Limbukan	40	0,0554
21		Balai Panjang	52	0,0832
22		Kapalo Koto Ampangan	40	0,0703
23		Sawahpadang Aua Kuniang	72	0,0798
24	**Payakumbuh Timur**	Balai Jaring	27	0,0358
25		Padang Alai Bodi	56	0,0719
26		Padang Tangah Payobadar	68	0,0536
27		Sicincin	145	0,1287

28		Padang Tiakar	151	0,0988
29		Payobasung	81	0,0917
30		Koto Panjang	91	0,1047
31		Koto Baru	68	0,1024
32		Tiakar	348	0,1539
33	**Payakumbuh Utara**	Napar	47	0,0502
34		Ompang Tanah Sirah	51	0,0517
35		Taratak Padang Kampuang	22	0,0409
36		Tigo Koto Dibaruah	67	0,0482
37		Tigo Koto Diate	85	0,0502
38		Ikua Koto Dibalai	72	0,0515
39		Balai Tongah Koto	54	0,0598
40		Kapalo Koto Dibalai	72	0,0629
41		Kotokociak Kubu Tapakrajo	98	0,0582
42	**Lamposi Tigo Nagori**	Sungai Durian	73	0,0840
43		Parit Muko Aie	41	0,0815
44		Parambahan	16	0,0392
45		Padang Sikabu	39	0,0657
46		Koto Panjang Padang	43	0,0675
47		Koto Panjang Dalam	45	0,0629
			3491	

Sumber. Data Administrasi Kelurahan, 2024

Data dari 47 kelurahan di Kota Payakumbuh diatas menghasilkan analisis FSVA 2025 untuk indikator Sarana prasarana ekonomi pangan menunjukkan bahwa kelurahan rentan pangan pada Prioritas 1; 6 kelurahan(12,77%), Prioritas 2; 3 kelurahan (6,39%), Prioritas 3; 18 kelurahan(38,29%). Kelurahan tahan pangan pada Prioritas 4; 11 Kelurahan (23,40%) , Prioritas 5; 4 kelurahan (23,40%) dan Prioritas 6; 2 (8,51%) kelurahan, seperti tabel berikut :

Tabel 2.2
Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Pangan Berdasarkan Prioritas

Prioritas	Payakumbuh Barat	Payakumbuh Utara	Payakumbuh Timur	Payakumbuh Selatan	Lampasi Tigo Nagari	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	3	1	1	0	1	6	12,77%

2	2	1	0	0	0	3	6,39%
3	5	7	1	2	3	18	38,29%
4	3	0	2	4	2	11	23,40%
5	2	0	3	0	0	5	10,64%
6	2	0	2	0	0	4	8,51%
Jumlah	17	9	9	6	6	47	100,%

Sumber: Data diolah Tim FSVA Kota Payakumbuh, 2024

Setelah dibuatkan dalam Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/ FSVA) sesuai sebaran rasio sarana prasarana ekonomi pangan hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Indikator Ketersediaan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan

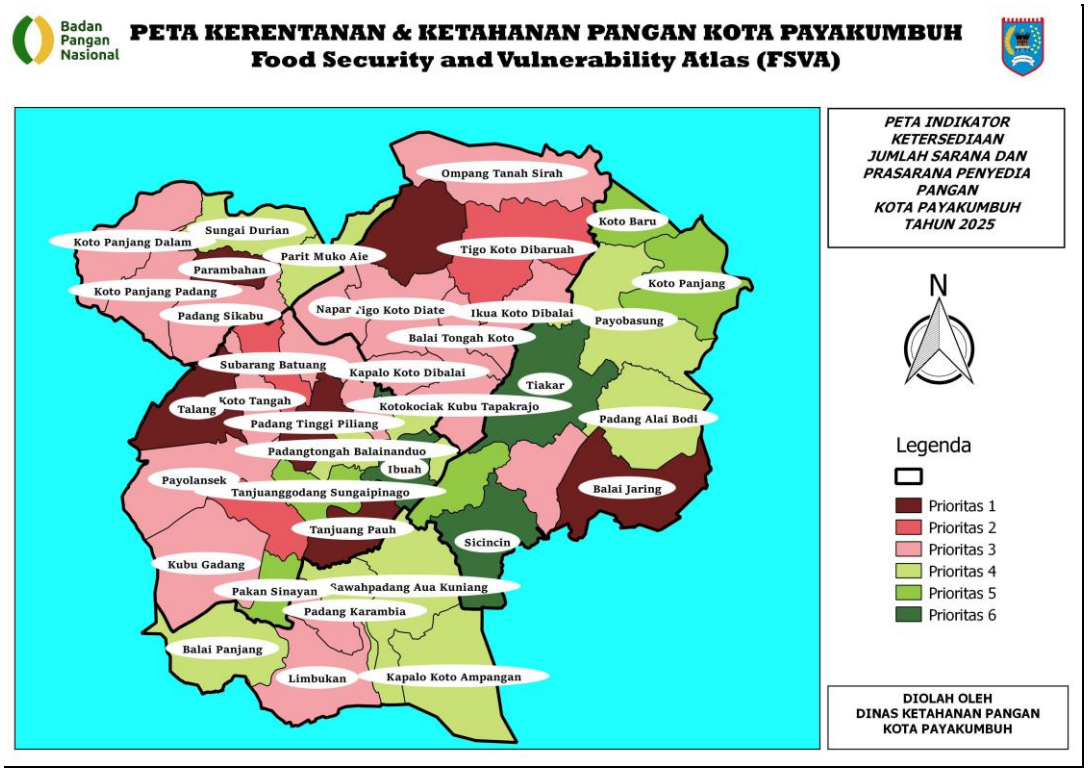

2.3 Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020-2024 mencapai 1,37 % per tahun sementara pertumbuhan produksi serealia mencapai 14,93%. Rata-rata kepemilikan lahan petani di Kota Payakumbuh adalah sebesar 0,3 ha. Rasio lahan pertanian dibandingkan lahan total adalah sebesar 34,18%. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 57,45%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan

Strategi untuk meningkatkan Ketersediaan Pangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, terdapat beberapa strategi pemerintah dalam peningkatan ketersediaan pangan melalui:

a. Penganekaragaman pangan.
b. Peningkatan produksi bibit dan benih dalam negeri.
c. Pembinaan petani dalam pembudidayaan bibit dan benih.
d. Bantuan pemasaran.
e. Pemberian subsidi untuk benih dan bibit.
f. Penanggulangan krisis pangan tersebut meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah, mobilisasi cadangan pangan masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan/atau menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.

Kebijakan kota mengenai ketersediaan pangan pada periode 2020-2025 bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iii) memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan produktivitas
    a. Melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)
    b. Optimalisasi penggunaan alsintan
    c. Penggunaan benih unggul
    d. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun pupuk kimia
    e. Pengelolaan air/irigasi

f. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) dan jaringan irigasi desa (JIDES)
g. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian
h. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petugas lapangan
i. Mengurangi kehilangan hasil (lossis) pada saat panen dan pengolahan hasil panen melalui penanganan panen dan pasca panen yang tepat.

2) Pengurangan dampak iklim terkait resiko
   a. Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman (OPT)
   b. Implementasi AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) untuk kelompok tani terhadap sawah yang gagal panen baik karena bencana alam maupun serangan hama penyakit.
   c. Memfasilitasi kelompok tani dalam melakukan penangangan serangan hama penyakit yaitu melalui pengadaan pestisida.
3) Penguatan kelembagaan bagi petani
   a. Revitalisasi kelompok tani
   b. Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat
   c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
   d. Pemasaran produk pertanian, misal TTI, dan lain lain
   e. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
   f. Desa Mandiri Pangan (DMP)
   g. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat / Lumbung Pangan Masyarakat
4) Penguatan ekonomi masyarakat
   a. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat
   b. Memunculkan inovasi baru untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat
   c. Memberikan pembinaan yang terkoordinir dangan baik untuk para pelaku UMKM di masing- masing wilayah kelurahan
   d. Memberikan kredit dengan bunga ringan dan jangka waktu yang panjang kepada para pelaku UMKM

BAB 3
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN

Keterjangkauan pangan adalah kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pangan yang cukup, baik secara ekonomi maupun fisik. Aspek ini meliputi daya beli yang memadai untuk membeli pangan, ketersediaan fisik pangan di pasar atau warung, serta bantuan sosial yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan. Keterjangkauan pangan merupakan salah satu dari tiga pilar ketahanan pangan yang krusial, selain ketersediaan dan pemanfaatan pangan.

Komponen-komponen keterjangkauan pangan

- Aspek Ekonomi:

  Kemampuan finansial individu atau rumah tangga untuk membeli pangan, yang dipengaruhi oleh pendapatan, daya beli, dan stabilitas harga.
- Aspek Fisik:

  Ketersediaan pangan di lokasi geografis tempat tinggal masyarakat, baik dari produksi lokal maupun pasokan dari luar daerah.

- Aspek Sosial:

  Akses terhadap pangan melalui bantuan sosial, pinjaman, atau bantuan dari masyarakat dan pemerintah.

Pentingnya keterjangkauan pangan

- Bagian dari ketahanan pangan:

  Tanpa keterjangkauan pangan yang baik, suatu wilayah belum dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan yang kuat, meskipun pangan tersedia secara fisik.
- Mendukung pemenuhan gizi:

  Dengan keterjangkauan yang memadai, masyarakat dapat mengakses pangan yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman, sesuai dengan kebutuhan gizi tubuh.
- Mengatasi kemiskinan dan kelaparan:

  Keterjangkauan pangan dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan dengan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara berkelanjutan

3.1 Penduduk dengan tingkat kesejahteraan Terendah

Kependudukan

Kependudukan adalah studi tentang dinamika populasi manusia yang mencakup ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta perubahannya dari waktu ke waktu akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Data kependudukan sangat penting bagi pemerintah untuk membuat kebijakan pembangunan, dan bagi individu untuk keperluan pribadi, seperti melamar pekerjaan.

Aspek kependudukan

- Demografi: Ilmu yang mempelajari dinamika penduduk, termasuk jumlah, struktur, dan distribusi penduduk.
- Parameter Kependudukan: Ukuran populasi yang digunakan untuk program kependudukan dan keluarga berencana, mencakup fertilitas, mortalitas, dan mobilitas.
- Fertilitas: Angka kelahiran.

- Mortalitas: Angka kematian.
- Migrasi: Perpindahan penduduk.
- Keluarga Berencana (KB): Program yang bertujuan untuk mengatur kehamilan, kelahiran, dan jarak kelahiran anak.

Pentingnya data kependudukan

- Untuk pemerintah: Membantu menyusun kebijakan pembangunan yang tepat dan pemerataan.
- Untuk individu: Memudahkan urusan pribadi seperti melamar pekerjaan, atau untuk keperluan medis.
- Untuk update data: Perubahan data seperti pendidikan, alamat, golongan darah, atau pekerjaan harus diperbarui secara berkala di instansi terkait.

Jumlah penduduk Kota Payakumbuh tahun 2025 sebesar 148,60 ribu jiwa atau 2,51 persen dari jumlah penduduk Sumatera Barat, dan 7,62 ribu jiwa atau 5,19 persen adalah

penduduk miskin. Tabel dibawah dapat memberikan informasi tentang jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 dan 2025.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kecamatan *District*	Jumlah Penduduk (ribu jiwa) *Population (thousand)*		Laju Pertumbuhan Penduduk *Population Growth Rate (%)*	
	2024	2025	2020–2024	2020–2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Payakumbuh Barat	57,20	57,90	1,31	1,29
2. Payakumbuh Selatan	12,93	13,18	2,01	2,00
3. Payakumbuh Timur	30,85	31,25	1,39	1,37
4. Payakumbuh Utara	33,19	33,43	0,83	0,82
5. Lamposi Tigo Nagari	12,56	12,85	2,38	2,35
Kota Payakumbuh	**146,73**	**148,60**	**1,37**	**1,35**

Sumber/*Source*: BPS, Proyeksi Penduduk/*BPS-Population Projection*

Ketenagakerjaan

Pada tahun 2024 jumlah industri di Kota Payakumbuh tercatat sebanyak 1.446 industri formal dan usaha non formal sebanyak 1.054 unit. Tenaga Kerja yang terserap di Industri formal sebanyak 4.203 orang dan sektor non formal sebanyak 3.360 orang.

Tabel 3.2
Jumlah Unit Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap

Jenis Industri/ Kinds of Industry	Unit Usaha/*Business Unit*		Tenaga Kerja/*Employee*	
	Formal	Non Formal	Formal	Non Formal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Industri Kimia, Agro dan hasil hutan *Chemical, Agro and Forest Product Industry*	1.223	490	3.634	2.730
Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka *Metal, Machine, Electronic and various Industry*	223	564	569	630
Jumlah / Total	**1.446**	**1.054**	**4.203**	**3.360**
2023	1.337	1.117	4.195	3.354
2022	905	1.095	3.480	3.005
2021	643	1.285	2.796	3.512
2020	630	1.272	2.808	3.463

Sumber / Source : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh / *Labor and Industry Department of Payakumbuh Municipality*

https://payakumbuhkota.bps.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah unit usaha pada tahun 2024 sektor formal sebanyak 1.446 unit dan sektor non formal sebanyak 1.054 unit, jumlah sektor non formal berkurang di banding tahun 2023 yang berjumlah 1.117 unit, berkurang sebanyak 63 unit usaha. Sedangkan di sektor formal terjadi penambahan unit usaha ditahun 2024 sebanyak 109 unit usaha dari 1.337 ditahun 2023 menjadi 1.446 di tahun 2024.

Tabel 3.3
Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

Kegiatan Utama *Main Activity*	Dewasa /*Adult*		Jumlah/ *Total*
	Laki-Laki/ *Male*	Perempuan/ *Female*	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja/*Economically Active*	44.435	33.441	77.876
Bekerja/*Working*	42.482	31.603	74.085
Pengangguran/*Unemployment*	1.953	1.838	3.791
Bukan Angkatan Kerja/ *Economically Inactive*	10.717	21.827	32.544
Sekolah/*Attending School*	4.462	4.553	9.015
Mengurus Rumah Tangga/*Housekeeping*	1.789	16.146	17.935
Lainnya/*Others*	4.466	1.128	5.594
Jumlah/*Total*	55.152	55.268	110.420
Bekerja Terhadap Angkatan Kerja /*Working to Economi- cally Active*	95,60	94,50	95,13
Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) *Labor Force Participa-tion Rate (%)*	80,57	60,51	70,53
Tingkat Pengangguran Terbuka *(TPT) Unemployment Rate*	4,40	5,50	4,87

Sumber/*Source*: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024/*August National Labor Force Survey 2024*

Penduduk kota Payakumbuh berumur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berjumlah 77.876 orang, sebanyak 74.085 orang telah bekerja diberbagai sektor baik formal maupun non formal, sedangkan 3.791 orang masih belum bekerja/ pengengguran.

Sebaran penduduk yang bekerja di masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Sebaran Pekerjaan Penduduk

Lapangan Pekerjaan Utama[1] *Main Industry[1]*	Jenis Kelamin /*Sex*		Jumlah/*Total*
	Laki-Laki/*Male*	Perempuan/*Female*	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	6.448	2.833	9.281
Manufaktur	9.721	5.651	15.372
Jasa	26.313	23.119	49.432
Jumlah/*Total*	42.482	31.603	74.085

Catatan/*Note* : 1 Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, Hunting, and Fisheries*
2 Industri Pengolahan/*Manufacturing Industry*
3 Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/*Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels*
Sumber/*Source* : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024/*August National Labor Force Survey 2024*

Berdasarkan Tingkat Pendidikan angkatan kerja penduduk Payakumbuh digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kegiatan Utama *Main Activity*	Angkatan Kerja/ *Economically Active*						
	Bekerja/ *Working*	Pengangguran/ *Unemployment*	Jumlah/ *Total*	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah/ *Total*	TPAK
(1)		(2)	(3)				(4)
Sekolah Dasar/ Tidak/Belum Tamat SD *Primary School*	15.205	185	15.390	98,80	7.576	22.966	67,01
Sekolah Menengah Pertama *Junior High School*	10.930	284	11.214	97,47	10.788	22.002	50,97
Sekolah Menengah Atas *Senior High School*	29.392	1.821	31.213	94,17	10.337	41.550	75,12
Perguruan Tinggi *College*	18.558	1.501	20.059	92,52	3.843	23.902	83,92
Jumlah/*Total*	74.085	3.791	77.876	95,16	30.515	108.391	71,85

Sumber/*Source*: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024/*August National Labor Force Survey 2024*

Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan *the structure still can be used and the building still stands.* minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Ukuran Kemiskinan

- ***Head Count Index*** **(HCI-P0)** adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- **Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*)** merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- **Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*)** memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Foster-Greer-Thorbecke (1984) merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan sebagai

  berikut :

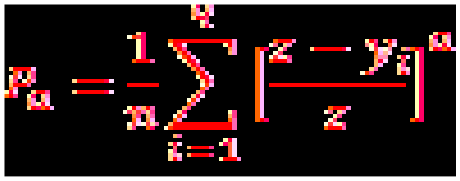

dimana:

a = 0, 1, 2

z = Garis kemiskinan

yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,…,q), yi < z

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika a=0, diperoleh Head Count Index (P0), jika a=1 diperoleh indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan jika

a = 2 disebut indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Pada tahun 2024, garis kemiskinan sebesar 648.230 rupiah. Dengan jumlah penduduk miskin 7,62 ribu orang atau 5,19 persen.

Tabel 3.6
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2016-2024

Tahun *Years*	Garis Kemiskinan *Poverty Line (rupiah)*	Penduduk Miskin *Number of Poor People*	
		Jumlah (ribu jiwa) *Total*	Persentase *Percentage*
(1)	(2)	(2)	(3)
2016	424.233	8,35	6,46
2017	441.736	7,72	5,88
2018	462.243	7,69	5,77
2019	482.184	7,68	5,68
2020	526.490	7,74	5,65
2021	543.335	8,66	6,16
2022	573.234	8,08	5,66
2023	616.357	7,88	5,44
2024	648.230	7,62	5,19

Sumber/*Source :* BPS Provinsi Sumatera Barat/*BPS-Statistics of Sumatera Barat Province*

https://payakumbuhkota.bps.go.id

Secara global, seseorang yang hidup di bawah ambang batas US$ 1,25 – *Purchasing Power Parity* (PPP) Bank Dunia per hari dikategorikan sebagai penduduk miskin. PPP ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Di Kota Payakumbuh, dengan garis kemiskinan sebesar Rp 648.230/kapita/bulan pada Tahun 2024, terdapat sebesar 7,62 ribu jiwa di Kota Payakumbuh yang dinyatakan miskin atau setara dengan 5,19 persen penduduk Kota Payakumbuh.

Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan (IKP, 2022). Kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan kerentanan pangan di suatu wilayah. Jika harga pangan tidak berbanding lurus dengan pendapatannya maka keluarga miskin akan semakin tertekan, sehingga akan berpengaruh ke kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3.7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, 2023 - 2024

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*		Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) *Number of Poor People (Thousand)*		Persentase Penduduk Miskin *Percentage of Poor People*	
		2023	2024	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten/*Regency*				
01.	Kepulauan Mentawai	13,76	14,19	13,72	13,89
02.	Pesisir Selatan	35,09	36,05	7,34	7,49
03.	Solok	27,33	28,18	7,13	7,31
04.	Sijunjung	15,02	14,99	5,88	5,78
05.	Tanah Datar	14,57	15,00	4,16	4,28
06.	Padang Pariaman	26,93	26,76	6,34	6,27
07.	Agam	33,41	34,82	6,60	6,83
08.	Lima Puluh Kota	27,02	27,72	6,80	6,92
09.	Pasaman	19,99	20,01	6,80	6,74
10.	Solok Selatan	11,91	12,33	6,45	6,56
11.	Dharmasraya	15,49	15,25	5,56	5,32
12.	Pasaman Barat	33,52	34,60	6,92	7,00
	Kota/*Municipality*				
71.	Padang	41,97	41,40	4,17	4,06
72.	Solok	2,35	2,40	3,05	3,07
73.	Sawahlunto	1,47	1,52	2,27	2,33
74.	Padang Panjang	2,99	3,06	5,24	5,31
75.	Bukittinggi	5,78	5,82	4,11	4,08
76.	Payakumbuh	7,88	7,62	5,44	5,19
77.	Pariaman	3,91	4,01	4,20	4,26
	Sumatera Barat	**340,37**	**345,73**	**5,95**	**5,97**

https://payakumbuhkota.bps.go.id

Tabel 3.8
Jumlah Penduduk Miskin Kota Payakumbuh Tahun, 2023 - 2024

No	Keterangan	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	7,88	7,62
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,44	5,19

Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 260 jiwa atau sekitar 0,25 persen.

Tabel 3.9
Jumlah Penduduk miskin Desil 1 dan jumlah penduduk tahun 2024 dan 2025 di masing-masing Kelurahan di Kota Payakumbuh

No	Kelurahan	Desil 1		Jumlah Penduduk	
		2024	2025	2024	2025
1	PAKAN SINAYAN	52	66	1.957	1.985

2	KUBU GADANG	175	181	2.716	2.748
3	BULAKAN BALAI KANDI	121	181	4.271	4.336
4	TANJUANG PAUAH	254	123	4.003	4.033
5	IBUAH	686	424	5.063	5.105
6	LABUAH BASILANG	181	84	2.017	2.063
7	PARAK BATUANG	122	115	983	1.000
8	PARIK RANTANG	595	561	5.186	5.193
9	PAYOLANSEK	514	341	4.898	4.935
10	SUBARANG BATUANG	90	90	2.196	2.244
11	KOTO TANGAH	50	101	2.557	2.655
12	TALANG	190	312	3.281	3.369
13	NUNANG DAYA BANGUN	304	262	3.667	3.725
14	PADANG TINGGI PILIANG	157	271	4.119	4.221
15	PADANGTONGAH BALAINANDUO	141	79	2.863	2.853
16	TANJUANGGODANG SUNGAIPINAGO	115	125	3.776	3.780
17	PADANGDATA TANAHMATI	541	312	2.976	2.991
18	BALAI PANJANG	96	137	2.022	2.070
19	LIMBUKAN	66	55	3.066	3.077
20	PADANG KARAMBIA	162	61	1.590	1.614
21	KOTOTUO LIMOKAMPUANG	80	53	1.274	1.287
22	KAPALO KOTO AMPANGAN	246	140	1.741	1.767
23	SAWAHPADANG AUA KUNIANG	180	119	2.962	3.021
24	PADANG TANGAH PAYOBADA	136	128	4.034	4.065
25	BALAI JARING	90	199	2.418	2.444
26	PAYOBASUNG	65	144	2.611	2.679
27	KOTO PANJANG	242	196	2.578	2.636
28	KOTO BARU	246	261	2.072	2.114
29	PADANG ALAI BODI	192	215	2.423	2.429
30	PADANG TIAKAR	261	208	4.626	4.671
31	SICINCIN	210	279	3.559	3.681
32	TIAKAR	343	307	6.842	7.116
33	NAPAR	264	267	3.002	3.080
34	OMPANG TANAH SIRAH	202	205	3.272	3.358
35	TARATAK PADANG KAMPUANG	92	271	1.857	1.874
36	TIGO KOTO DIBARUAH	237	306	4.592	4.740
37	TIGO KOTO DIATE	616	446	5.576	5.699
38	KAPALO KOTO DIBALAI	182	202	3.863	3.714
39	KOTOKOCIAK KUBU TAPAKRAJO	206	180	5.462	5.431
40	BALAI TONGAH KOTO	321	290	2.870	2.925
41	IKUA KOTO DIBALAI	259	147	3.683	3.714
42	KOTO PANJANG PADANG	254	188	2.005	2.080
43	KOTO PANJANG DALAM	264	256	2.453	2.449
44	PARAMBAHAN	266	189	1.309	1.310
45	PADANG SIKABU	64	124	2.006	2.067
46	PARIT MUKO AIE	193	171	1.628	1.679
47	SUNGAI DURIAN	201	247	2.847	2.877
	Jumlah	10.524	9.619	146.772	148.904

Sumber: Data DTSEN desil 1 Dinas Sosial

Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin desil 1 tahun 2024 10.524 jiwa menjadi 9.619 jiwa pada tahun 2025 atau sebanyak 905 jiwa.

Tabel 3.10
Sebaran Kelurahan dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range Tidak Sejahtera	Jumlah kelurahan	Persentase
1	>= 0,1018	8	17,02
2	0,0831 -< 0,1018	7	14,89
3	0,0659-< 0,0831	9	19,15
4	0,0412-< 0,0659	10	21,28
5	0,0332-< 0,0412	7	14,89
6	< 0,0332	6	12,77

Gambar 3.1
Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Indikator Jumlah Penduduk dengan tingkat Kesejahteraan Terendah

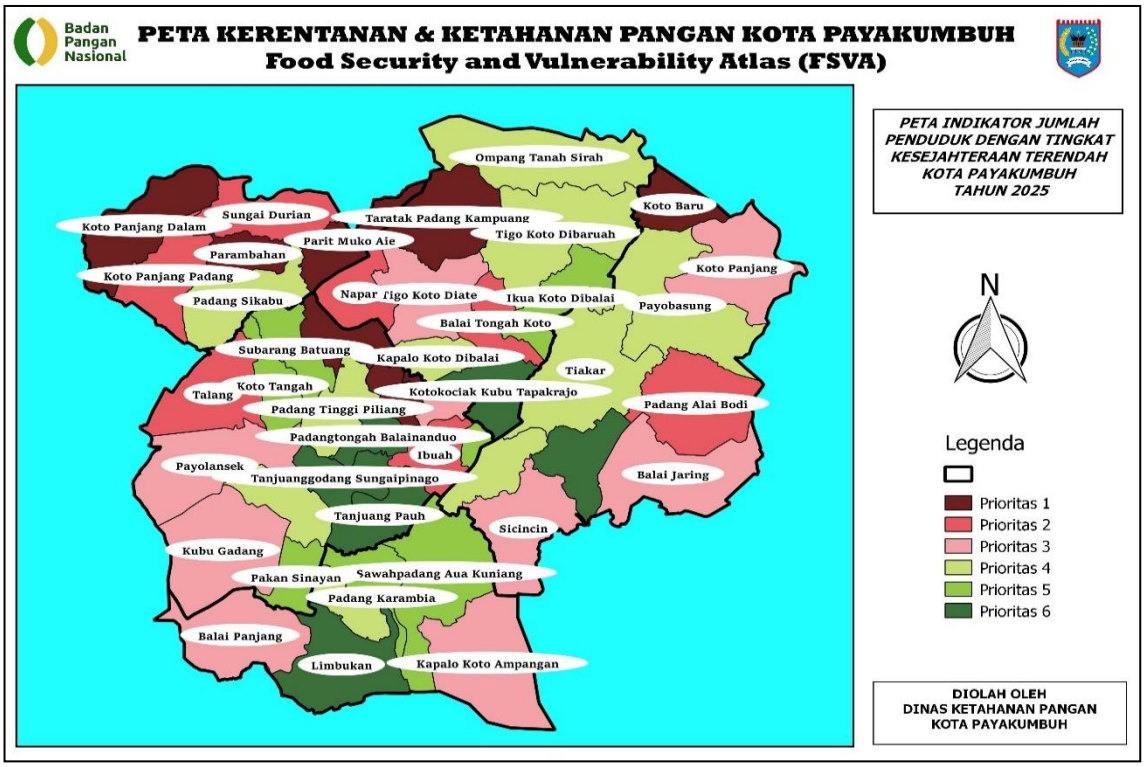

3.2 Akses Penghubung

Infrastruktur transportasi dan gudang penyimpanan adalah hal penting dalam

ketahanan pangan dan gizi. Keseluruhan rantai pasokan pangan membutuhkan infrastruktur udara, pelabuhan dan jalan yang baik, untuk mengangkut bahan pangan tepat waktu dengan biaya yang efektif. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah di Kota Payakumbuh juga menjadi faktor pendukung utama peningkatan produktivitas sektor pertanian, khususnya yang terkait dengan biaya transportasi.

Terdapat 322,812 km jalan di Kota Payakumbuh pada tahun 2025 dimana sepanjang 14,450 km merupakan jalan negara yang berstatus kondisi baik sepanjang 12,550 km(86,85%) dan kondisi sedang sepanjang 1,900 km (13,15%) dengan permukaan aspal hotmix; 12,980 km jalan provinsi dengan kondisi baik sepanjang 6,546 km (50,43%), kondisi sedang 1,000 km (7,70%) dan kondisi rusak ringan 5,434 km (41,86%). Sementara itu 295,382 km sisanya merupakan status jalan kota dengan kondisi baik sepanjang 196,842 km(66,64%), rusak sedang sepanjang 43,007 km (14,56%) dan rusak ringan sepanjang 46,830 km (15,85%) serta rusak berat sepanjang 8,703 km (2,95%) (PDA 2025 hal 412).

Tabel 3.11
Panjang jalan menurut kondisi jalan dan pemerintah yang berwenang di Kota Payakumbuh (km) tahun 2024

	Jenis Permukaan *Surface Type*	Status Pemerintah yang Berwenang/*Government*			Jumlah *Total*
		Nasional/ *National*	Propinsi/ *Province*	Kota/ *Municipality*	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Baik/*Good*	12,550	6,546	196,842	215,938
2	Sedang/*Moderate*	1,900	1,000	43,007	45,907
3	Rusak/*Damaged*	–	5,434	46,830	52,264
4	Rusak Berat/*Severily Damage*	–	–	8,703	8,703
	Jumlah/*Total*	**14,450**	**12,980**	**295,382**	**322,812**
	2023	...	...	...	...
	2022	...	...	...	...
	2021	15,447	16,220	254,678	286,345
	2020	15,447	16,220	254,678	286,345

Sumber/*Source*: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh/*Public Work and Spatial Planning Agency of Payakumbuh Municipality*

Tabel 3.12
Panjang Jalan menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kota Payakumbuh

	Kecamatan/ *District*	Kondisi Jalan/*Road Condition*				
		Baik/ *Good*	Sedang/ *Moderate*	Rusak/ *Damaged*	Rusak Berat/ *Severely Damaged*	Jumlah/ *Total*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Payakumbuh Barat	65,816	13,636	10,821	629	90,902
2	Payakumbuh Timur	34,236	8,556	14,116	288	57,196
3	Payakumbuh Utara	42,168	11,797	10,433	2,311	66,709
4	Payakumbuh Selatan	27,663	3,133	6,747	4,051	41,594
5	Lamposi Tigo Nagori	26,959	5,885	4,713	1,424	38,981
	Jumlah/*Total*	**196,842**	**43,007**	**46,830**	**8,703**	**295,382**

Catatan/*Note :* Data Tahun 2024 tidak tersedia
Sumber/*Source:* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh/*Public Work and Spatial Planning Agency of Payakumbuh Municipality*

Tabel 3.13
Panjang jalan menurut kecamatan dan pemerintah yang mengelola di Kota Payakumbuh tahun 2024

	Kecamatan/ *District*	Status Pemerintah yang Berwenang/*Government*			Jumlah/ *Total*
		Nasional/ *National*	Propinsi/ *Province*	Kota/ *Municipality*	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Payakumbuh Barat	8,450	–	90,902	99,352
2	Payakumbuh Timur	–	6,680	57,196	63,876
3	Payakumbuh Utara	6,000	1,300	66,709	74,009
4	Payakumbuh Selatan	–	5,000	41,594	46,594
5	Lamposi Tigo Nagori	–	–	38,981	38,981
	Jumlah/*Total*	**14,450**	**12,980**	**295,382**	**322,812**

Sumber/*Source:* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh/*Public Work and Spatial Planning Agency of Payakumbuh Municipality*

Kota Payakumbuh dengan kondisi geografis yang dilalui oleh sungai dan anak sungai,

membutuhkan jembatan sebagai penghubung satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dari catatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, tercatat sebanyak 73 unit jembatan di Kota Payakumbuh, yang tersebar di semua kecamatan yang ada. Kecamatan Payakumbuh Utara merupakan kecamatan yang memiliki jumlah jembatan terbanyak yaitu sebanyak 25 jembatan, diikuti oleh Kecamatan Payakumbuh Timur dengan 16 jembatan.

Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya membangun jaringan jalan berkualitastinggi yang dapat mengurangi resiko biaya perdagangan dan meningkatkan akses ke pasar. Pengembangan sarana transportasi dan gudang penyimpanan dapat menurunkan harga pangan, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan petani dengan mengurangi biaya-biaya terkait lainnya. Selain memastikan rantai pasokan pasar berjalan dengan baik, akses jalan juga dapat meningkatkan investasi antar sektor dan meningkatkan akses pelayanan, serta berkontribusi terhadap standar kehidupan secara menyeluruh, khususnya untuk daerah pedesaan. Tersedianya infrastruktur yang handal dan berkualitas memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui dampak positif terhadap produktivitas, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan baik disektor pertanian maupun non pertanian. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dapat menjangkau petani yang lebih terpencil serta memberikan bantuan teknis dan informasi untuk meningkatkan produksi. Akses pendidikan dapat ditingkatkan karena murid-murid dan guru-guru mempunyai kesempatan untuk melakukan perjalanan menuju sekolah mereka masing-masing, yang pada gilirannya dapat meningkatkan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Semua masyarakat juga dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Tabel 3.14
Data Panjang Jalan Kota dan Tingkat Aksesibilitas

No	Nama Kecamatan	Panjang Jalan Kota (Meter)	Tingkat Aksesibilitas
1	Payakumbuh Barat	97.129	100 %
2	Payakumbuh Timur	65.623	100 %
3	Payakumbuh Utara	62.639	100 %
4	Payakumbuh Selatan	35.295	100 %

5	Lamposi Tigo Nagori	34.696	100 %
	Total	295.382	

Sumber. Dinas PUPR tahun 2025

Berdasarkan data Dinas PUPR Kota Payakumbuh, di Kota Payakumbuh jalan dapat dikelompokkan sebagai berikut: jalan tanah 2,535 km, jalan kerikil 6,779 km, jalan cor beton 24,816 km dan jalan aspal hotmix 288,682 km. Dengan status Jalan negara 14,450 km, jalan provinsi 12,980 km dan jalan kota 295,382 km. Semua kecamatan dan kelurahan memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepajang tahun.

Gambar. 3.2
Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Indikator Akses Pangan Kelurahan tanpa Akses Penghubung Memadai

3.3 Strategi Peningkatan Keterjangkauan Pangan

Strategi Pengurangan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Agam memiliki strategi-strategi seperti yang termuat dalam RPJMD 2021 – 2026, diantaranya:

a. Meningkatkan kinerja lapangan usaha yang dominan diusahakan masyarakat
   - Meningkatkan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang

memiliki kemampuan dan keberdayaan sesara sosial maupun secara ekonomi
- Meningkatkan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi peermpuan.

b. Meningkatkan perlindungan kepada masyarakat penyandang masalah sosial
c. Meningkatkan infrastruktur dasar pendukung kegiatan ekonomi masyarakat
d. Meningkatakn konektifitas antar kawasan
   - Strategi peningkatan kondisi jalan dan jembatan
   - Strategi meningkatkan jaringan dan layanan transportasi umum
   - Strategi peningkatan layanan jaringan internet
e. Meningkatkan realisasi investasi
f. Meningkatkan daya saing tenaga kerja

Selain infrastruktur, adaptasi terhadap anomali iklim (*Climate Change Adaptation*) akan menjadi salah satu faktor kunci untuk menjamin kesinambungan perbaikan akses pangan dan penghidupan rumah tangga yang miskin ataupun rentan. Petani kecil harus terlindungi dari besarnya peluang gagal panen yang disebabkan adanya anomali iklim melalui inisatif perlindungan yang inovatif.

BAB 4
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN

Pilar ketiga dari ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: 1. pemanfaatan pangan yang bisa diakses oleh rumah tangga; dan 2. kemampuan individu untuk menyerap zat gizi – pemanfaatan makanan secara efisien oleh tubuh.

Aspek pemanfaatan pangan tergantung pada: i) fasilitas penyimpanan dan pengolahan makanan yang dimiliki oleh rumah tangga; ii) pengetahuan dan praktek yang berhubungan dengan penyiapan makanan, pemberian makanan untuk balita dan anggota keluarga lainnya yang sedang sakit atau sudah tua yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu atau pengasuh serta adat/ kepercayaan; iii) distribusi makanan dalam anggota keluarga; dan iv) kondisi kesehatan masing-masing individu yang mungkin menurun karena penyakit, kebersihan, air dan sanitasi yang buruk serta kurangnya akses ke fasilitas dan pelayanan kesehatan.

4.1 Akses terhadap air bersih

Akses terhadap air bersih sangat berperan penting dalam ketahanan pangan Daerah. Akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting dalam mengurangi masalah penyakit khususnya diare, sehingga dapat memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Upaya peningkatan akses rumah tangga dengan akses air bersih di Kota Payakumbuh sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat yaitu melakukan pemicuan lima pilar STBM, Edukasi, advokasi dan koordinasi percepatan stop buang air besar sembarangan, peningakatan akses rumah tangga dengan akses sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan dan pemberdayaan kader untuk implementasi lima pilar STBM.

Tabel. 4.1
Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih	Rasio
1	Payakumbuh Barat	17.481	0	100
2	Payakumbuh Selatan	3.932	0	100
3	Payakumbuh Timur	10.135	0	100
4	Payakumbuh Utara	10.366	0	100
5	Lamposi Tigo Nagori	3.726	0	100
	Kota Payakumbuh	**45.640**	**0**	100

Sumber:Data Dinas Kesehatan*

Gambar 4.1
Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Indikator Pemanfaatan Jumlah Rumah Tangga tanpa Akses Air Bersih

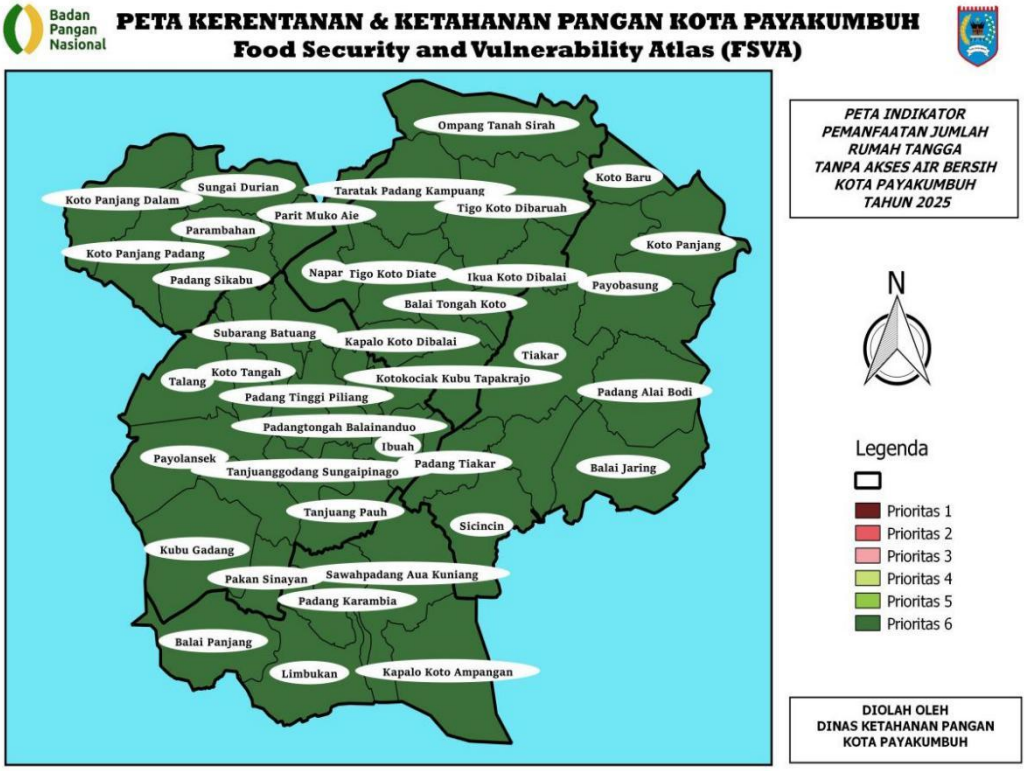

4.2 Akses terhadap tenaga kesehatan

Secara keseluruhan penyediaan pelayanan kesehatan dinilai cukup baik. Kota Payakumbuh memiliki 4 rumah sakit (1 milik daerah dan 3 milik swasta), dengan 171 Posyandu serta 8 Puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan, 23 puskesmas pembantu, serta sekitar 21 dokter yang merupakan gabungan dari dokter spesialis dan dokter umum. Sedangkan untuk dokter gigi, Kota Payakumbuh memiliki 11 dokter gigi. (Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024).

Untuk jumlah tenaga medis termasuk bidan dan perawat di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 1.501 tenaga medis yang tersebar di seluruh fasilitas kesehatan di 5 kecamatan. Secara kualitas, berdasarkan tingkat perkembangan Posyandu dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Peningkatan kualitas Posyandu tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain meningkatnya kinerja Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu baik di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan.

Tabel 4.2
Jumlah tenaga kesehatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Jumlah Tenaga Kesehatan	Rasio
1	Payakumbuh Barat	57.236	3.001	Kota 546	18,19
2	Payakumbuh Selatan	12.836	881	186	21,11
3	Payakumbuh Timur	31.835	1357	283	20,85
4	Payakumbuh Utara	34.535	2284	303	13,26
5	Lamposi Tigo Nagori	12.462	1333	183	13,73
	Kota Payakumbuh	**148.904**	**8.856**	**1.501**	**87,14**

Gambar 4.2
Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Indikator Jumlah Tenaga Kesehatan

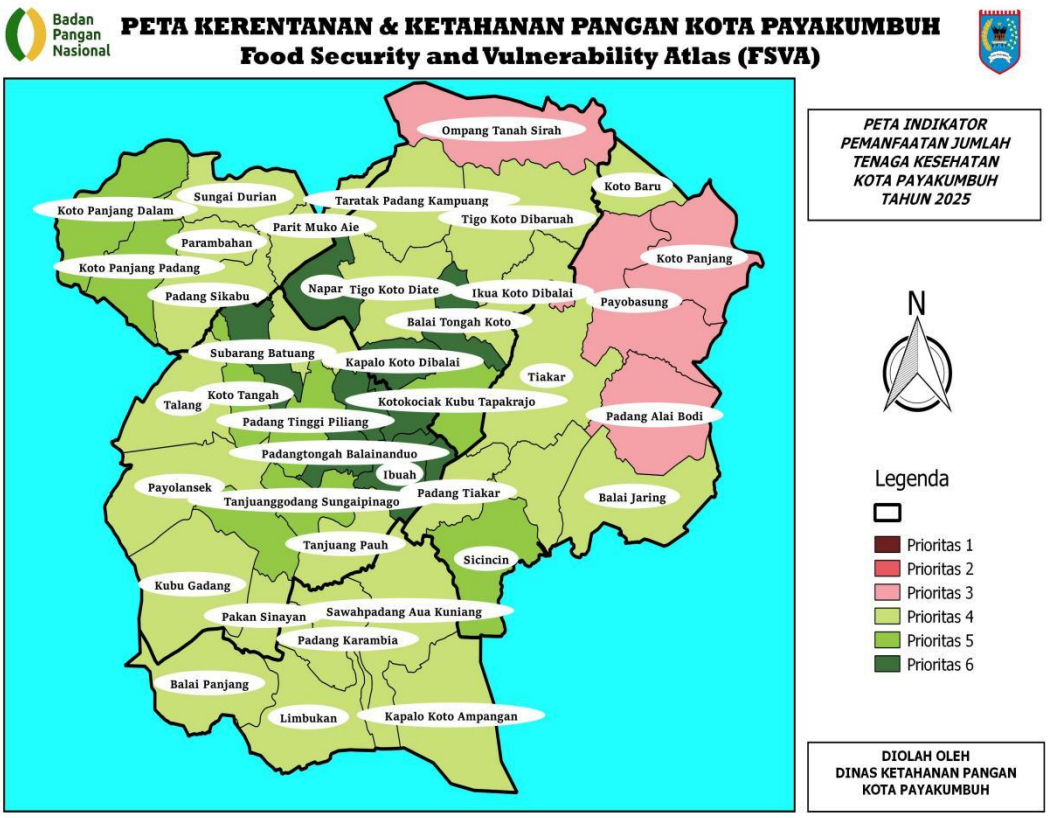

Secara umum, akses terhadap fasilitas kesehatan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi pemerintah daerah untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur

kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan meningkat dari Tahun 2019 ke tahun 2023.

Tabel 4.3
Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range Tenaga Kesehatan	Jumlah Nagari	Persentase
1	>= 0,2667	0	0,00
2	0,1812 -< 0,2667	0	0,00
3	0,1094 -< 0,1812	4	8,51
4	0,0426 -< 0,1094	25	53,19
5	0,0229 -< 0,0426	8	17,02
6	< 0,0229	10	21,28

4.3 Dampak dari Status Kesehatan

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu: Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan underweight (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis); Pendek atau stunting (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kota Payakumbuh pada tahun 2024 sebanyak 13 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Payakumbuh Barat (8 balita), dan terendah ditemukan di Kecamatan Payakumbuh Selatan (1 balita)

Tabel 4.4
Penderita Gizi Buruk 2020-2024

Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
	2020	2021	2022	2023	2024
Payakumbuh Barat	0	2	7	3	8
Payakumbuh Selatan	0	0	2	0	1

Payakumbuh Timur	0	0	1	4	4
Payakumbuh Utara	0	0	0	1	2
Lamposi Tigo Nagori	0	0	0	0	0
Jumlah	**0**	**2**	**10**	**8**	**15**

Sumber: Kota Payakumbuh Dalam Angka

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kota Payakumbuh adalah 13 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kota Payakumbuh adalah 0 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak 5 jiwa dan terendah terdapat di Kecamatan Payakumbuh Selatan (0 jiwa). Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu saat Melahirkan	Total
1	Payakumbuh Barat	5	0	5
2	Payakumbuh Selatan	0	0	0
3	Payakumbuh Timur	3	0	3
4	Payakumbuh Utara	3	0	3
5	Lamposi Tigo Nagori	2	0	2
	Kota Payakumbuh	**13**	**0**	**13**

Sumber: Kota Payakumbuh Dalam Angka (BPS.2024)

BAB 5
KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Ketahanan pangan dirumuskan sebagai adanya keterjaminan seluruh masyarakat di dalam suatu kawasan/wilayah tercukupi kebutuhan pangannya dan gizinya yang merupakan syarat utama untuk mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan, yang dapat diukur melalui kecukupan/ketersediaan, stabilitas ketersediaan, dan aksesibilitas. Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan selama ini telah banyak memperlihatkan tingkat keberhasilannya, seperti ditunjukan oleh peningkatan produksi komoditas pangan, perbaikan kualitas konsumsi masyarakat dan penurunan penduduk miskin. Namun keberhasilan tersebut belum dapat sepenuhnya mengatasi tingkat kerawanan pangan. Jumlah penduduk yang rawan pangan dan kekurangan gizi masih cukup besar sehingga perlu mendapat perhatian secara terus menerus. Kerawanan pangan merupakan masalah yang kompleks, kecukupan penyediaan pangan pada tingkat makro tidak serta merta dapat mengatasi kerawanan pangan dan perbaikan kualitas konsumsi masyarakat. Disamping penyediaan, kerawanan pangan dan kualitas konsumsi masyarakat juga

dipengaruhi oleh distribusi pangan, daya beli masyarakat, pengetahuan gizi masyarakat, dan terjadinya pemborosan pangan (Suryana, 2014). Kerawanan pangan merupakan masalah multi dimensional yang menurut Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Program (2005) didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktifitas dengan baik secara sementara maupun pada jangka panjang.

Kondisi kerawanan pangan merupakan kebalikan dari ketahanan pangan. Indikator pencapaian ketahanan pangan terdiri 2 (dua) indikator yaitu indikator proses dan indikator dampak. Indikator proses ditunjukkan oleh ketersediaan dan akses pangan. Indikator ketersediaan berkaitan dengan produksi pertanian, iklim, akses terhadap sumberdaya alam, pengembangan institusi, pasar. Sedangkan indikator akses pangan meliputi pendapatan, akses terhadap moda. Indikator dampak terdiri dari dua yaitu dampak secara langsung dan tidak langsung. Dampak secara langsung meliputi konsumsi, frekuensi pangan, status gizi sedangkan dampak secara tidak langsung meliputi penyimpanan pangan.

5.1. Kondisi Ketahanan Pangan

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kelurahan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan Tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relative lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kelurahan) prioritas 1 memiliki Tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 47 kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh maka diketahui tidak terdapat kelurahan yang masuk dalam kategori sangat rentan pangan (Prioritas 1) dan rentan pangan (Prioritas 2), ada 6 kelurahan yang agak rentan pangan (Prioritas 3), 30 kelurahan dalam kategori agak tahan pangan (Prioritas 4), 11 kelurahan masuk kategori tahan pangan (Prioritas 5) dan belum ada yang masuk kategori sangat tahan pangan (Prioritas 6).

Banyak faktor dapat mempengaruhi kerentanan rumah tangga terhadap

kerawanan pangan. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menurut keterkaitannya dengan tiga dimensi ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan serta pemanfaatan zat-zat gizi dalam pangan. Berdasarkan literatur yang ada, peta ini menetapkan enam indikator yang mencakup setiap tiga dimensi ketahanan pangan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang ada. Hubungan antar indikator dan ketahanan pangan, dijelaskan secara rinci pada Bab 2 sampai 4.

Sesuai dengan kesepakatan Tim Penyusun FSVA, metodologi untuk penyusunan peringkat dan pengelompokkan kelurahan ke dalam prioritas-prioritas pada FSVA Payakumbuh 2024 ini menggunakan metode *cut-off point* (ambang batas). Kelurahan-kelurahan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi.

Pengelompokan kelurahan dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan, dimana masing- masing prioritas akan memiliki *cut-off point* (ambang batas) yang tetap berdasarkan pembobotan pada 6 indikator kerawanan pangan kronis. Kelebihan dari metode *cut-off point* adalah dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan target kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang akan dicapai oleh pemerintah, serta memudahkan melihat trend perubahan situasi ketahanan pangan antar wilayah di Indonesia.

Tabel 5.1
Hasil Komposit Ketahahan Pangan berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	0	0,00
2	0	0,00
3	6	12,77
4	30	63,83
5	11	23,40
6	0	0,00

Gambar 5.1
Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025

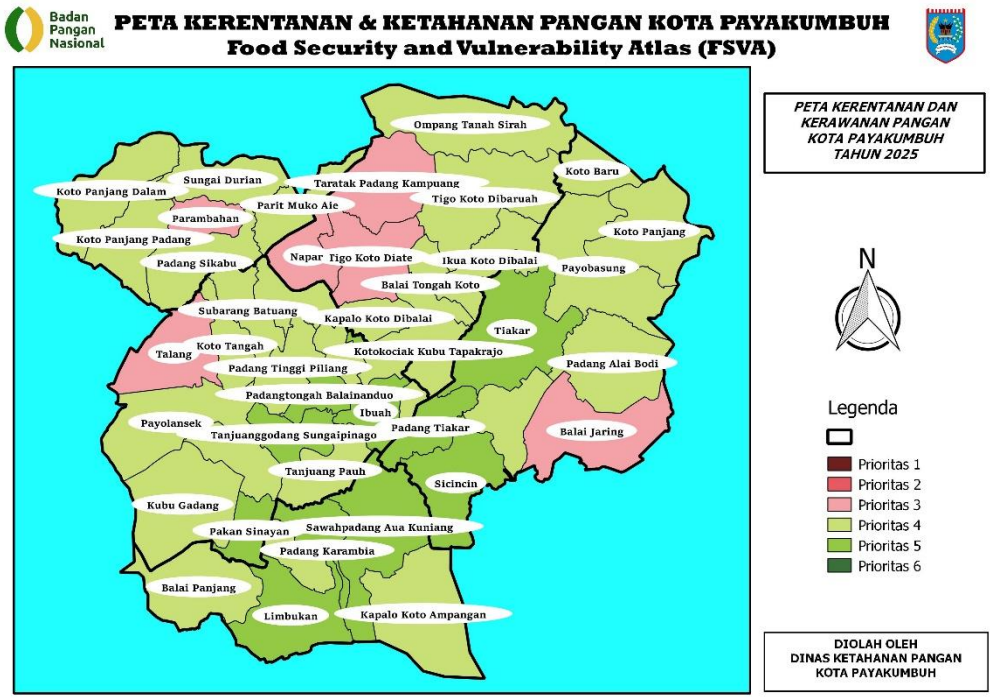

Kelurahan-kelurahan di Prioritas 3 cenderung rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi, sedangkan kelurahan-kelurahan Prioritas 4, 5 dan 6 termasuk kategori tahan pangan. Wilayah Kelurahan dipetakan dalam gradasi warna merah untuk kelompok prioritas 1, 2 dan 3 dan gradasi warna hijau untuk Prioritas 4, 5 dan 6.

5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan

Kelurahan yang masuk dalam Prioritas 3 adalah kelurahan-kelurahan yang memiliki tingkat kerentanan yang agak aman pangan dari pada kelurahan dengan prioritas di atasnya. Kelurahan yang rentan pangan ini secara umum disebabkan oleh faktor rendahnya rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga dan tingginya rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terrendah terhadap jumlah penduduk.

Penting untuk diingat, bahwa tidak semua rumah tangga di kelurahan-kelurahan prioritas tinggi (Prioritas 2-3) tergolong rawan pangan, demikian juga tidak semua rumah tangga di kelurahan-kelurahan prioritas rendah (Prioritas 4-6) tergolong tahan pangan. Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk mengidentifikasi dimanakah kelurahan yang lebih rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi.

Berdasarkan analisis komposit ketahanan pangan, 47 Kelurahan di 5 kecamatan di Kota Payakumbuh dikelompokkan kedalam enam kelompok prioritas yakni sebagai berikut : tidak ada kelurahan yang masuk kategori Prioritas 1 dan Prioritas 2, pada prioritas 3 (12,77 persen) terdapat 6 kelurahan (Kelurahan Talang, Kelurahan Balai Jariang, Kelurahan Napar, Kelurahan Parambahan, Kelurahan Taratak Padang Kampuang dan Kelurahan Tigo Koto Diate), pada prioritas 4 (63,83 persen) terdapat 30 Kelurahan dan pada Prioritas 5 terdapat 11 kelurahan (23,40 persen). Jika dilihat dari presentasi tersebut, terdapat 6 kelurahan di Kota Payakumbuh yang tergolong dalam kelurahan yang rentan pangan rendah.

Gambar 5.2

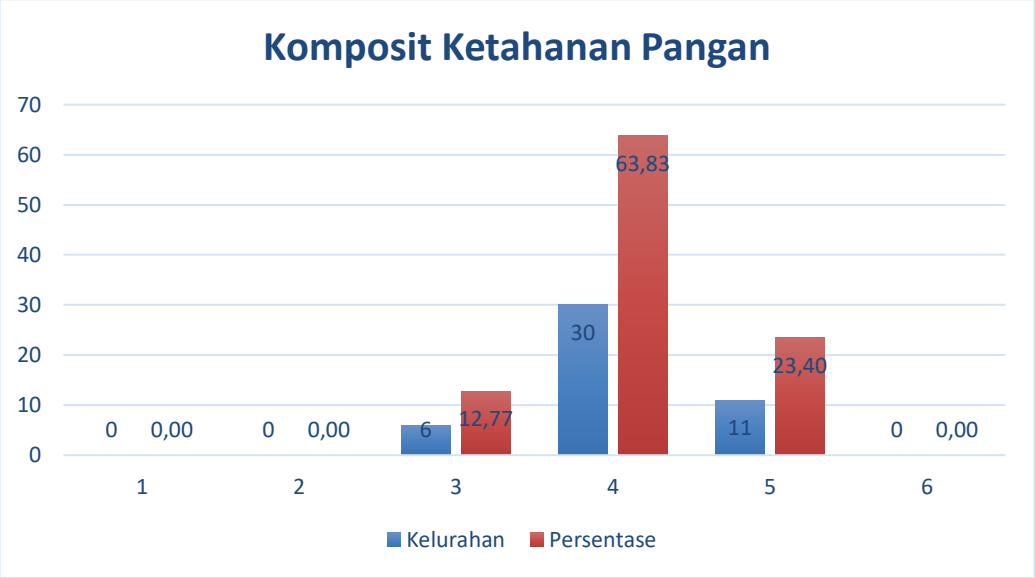

Karakteristik utama dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di tiap kelurahan berbeda-beda, maka pendekatan-pendekatan khusus untuk mengurangi kerentanan juga akan berbeda-beda pada setiap kelurahan. Dengan menentukan karakteristik utama dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kelurahan, maka peta ini dapat memberikan petunjuk yang lebih baik kepada para pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektifitas dan penentuan program ketahanan pangan.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pengurangan kerawanan pangan harus ditekankan pada penyelesaian akar utama penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan dengan mengacu kepada perubahan paradigma ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

BAB 6
REKOMENDASI KEBIJAKAN

6.1 Kesimpulan

Penurunan kemiskinan yang berkesinambungan dan kemajuan program-program pemerintah lainnya telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan di Kota Payakumbuh. Namun demikian, kemajuan ini memiliki resiko stagnasi jika tantangan utama tidak ditangani. Terdapat 3 faktor utama yang memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah, yaitu: i) meningkatkan akses ekonomiatau akses keuangan untuk mendapatkan pangan, terutama untuk rumah tangga miskin; ii) akselerasi intervensi untuk pencegahan kekurangan gizi. Hal ini untuk menyikapi perubahan kompleksitas masalah kedaulatan pangan, dari hanya kurang pangan ke *Multiple Burden Malnutrition*; dan iii) mengatasi kerentanan terhadap resiko perubahan iklim yang semakin meningkat.

Sub Bab dibawah ini akan menjelaskan tentang rekomendasi yang terkait dengan 3 faktor utama di atas. Ketiga faktor tersebut saling terkait dalam meletakkan aspek gizi menjadi tema sentral yang bersinggungan erat dengan kedua aspek lainnya. Hal ini mencerminkan pentingnya pengarusutamaan pendekatan yang

berbasis gizi untuk program dan kebijakan ketahanan pangan dan gizi.

Akses ekonomi

Isu kemiskinan merupakan dampak dari permasalahan pembangunan yang muncul dari berbagai bidang seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajad kesehatan, infrastruktur yang belum merata, masih tingginya penyandang masalah sosial dan tentunya kinerja ekonomi yang belum mampu memberdayakan penduduk miskin sehingga keluar dari kemiskinan, maka untuk penanggulangannya memerlukan strategi dan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi baik antar bidang pembangunan maupun antar tingkatan lembaga pemerintahan.

Dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,19 persen pada 2024, maka program bantuan sosial dan jaring pengaman sosial menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung rumah tangga miskin dalam mendapatkan akses pangan yang memadai. Program jangka panjang jugatelah dilakukan yang mencakup penguatan dan diversifikasi mata pencaharian serta perluasan infrastruktur dasar dan pelayanan. Selain itu, perlu peningkatan alokasi anggaran untuk program bantuan sosial dan reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan sensitivitas gizi dari program, maka program tersebut dapat memiliki dampak penting pada akses pangan.

Peningkatan sistem distribusi pangan, dimana distribusi pangan menjadi kendala pada musim-musim tertentu, melalui perbaikan sarana prasarana utama seperti jalan dan sarana transportasi, serta memperkuat kelembagaan pasar. Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk melindungi petani produsen beras dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga pasar yang terlalu tinggi.Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah juga dapat dilaksanakan secara berkala pada saat terjadi lonjakan harga yang juga bertujuan untuk terciptanya stabilitas pasokan dan harga pangan.

Tinjauan dan perbaikan insentif untuk produksi pangan, termasuk jaminan harga, subsidi dan pembatasan perdagangan, dapat membantu memastikan bahwa produksi pangan bergizi tinggi, termasuk komoditas kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan, perlu diberi prioritas yang sama seperti produksi pangan pokok. Meningkatkan produksi hasil pertanian tersebut mungkin memerlukan biaya yang lebih tinggi, sehingga diperlukan insentif bagi petani untuk menghasilkan bahan pangan yang bergizi, dimana pada gilirannya akan membuat bahan pangan

tersebut kurang terjangkau bagi mereka yang berada pada risiko gizi kurang. Keadaan ini dapatdikurangi dengan menggunakan jaring pengaman sosial yang memadai.

Dampak terhadap gizi

Meskipun telah terjadi perbaikan situasi ketahanan pangan dan gizi, tetapi masih terdapat kekurangan pada pencapaian indikator ketahanan gizi seperti terlihat pada data-data yang ada.

Di Kota Payakumbuh, permasalahan kekurangan gizi bukan hanya masalah orang miskin. Untukpenduduk tidak miskin tetapi kurang gizi, hambatan untuk mencapai status yang lebih bergizi belum tentu terkait pada akses ekonomi atau program pengentasan kemiskinan pemerintah, akan tetapi juga berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap praktek pola makan dan gizi yang baik serta pola asuh yang kurang tepat. Sebaliknya,untuk penduduk miskin yang kurang gizi akan menghadapi tambahan permasalahan untuk akses ekonomi dan sosial.

Pendekatan multi-sektoral untuk mengurangi dan mencegah kekurangan gizi di Kota Payakumbuh sangat penting dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat serta sektor swasta. Untuk lembaga pemerintah, koordinasi lintas sektor sangat perlu ditingkatkan guna mengatasi hambatan kelembagaan dalam pembuatan kebijakan dan program pemerintah, dimana dapat memperbaiki sensitifitas gizi dari program kesejahteraan, pertanian dan atau program perubahan iklim yang ada.

Ada banyak peluang untuk meningkatkan sensitifitas gizi dalam program-program pertanian. Program penyuluhan pertanian dapat lebih diarahkan kepada memberi masukan dan membantu petani dalam budidaya, penanganan pasca panen dan penyimpanan berbagai tanaman pangan bukan hanya di lahan pertanian tetapi juga dipekarangan rumah, terutama untuk kecamatan dan nagari yang termasuk rentan terhadap kondisi rawan pangan. Sektor pertanian akan mendapat manfaat dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih diarahkan ke spesies dan varietas tanaman pangan yang relatif memiliki nilai gizi tinggi. Program-program ini dapat juga bekerjasama dengan kelompok tani yang telah ada untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan dan gizi kepada masyarakat. Melibatkankaum perempuan secara lebih luas, dimana perempuan bertanggung jawab dalam produksi pangan, pembelian, persiapan, distribusi dalam keluarga dan pemberian makanan, terutama pada masyarakat petani baik dalam desain program pertanian maupun sebagai peserta program, juga berperan penting

dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.

Di luar program-program pemerintah, peran sektor swasta dalam meningkatkan status gizi semakin penting mengingat sektor swasta dapat meningkatkan ketersediaan bahan pangan olahan yang umumnya tinggi lemak dan gula - dengan harga yang relatif murah. Berkaitan dengan pendidikan, keterjangkauan dan peningkatan kesadaran tentang makanan bergizi dan seimbang harus terus menjadi strategi utama untuk mengatasi kesenjangan gizi di Kota Payakumbuh. Untuk melengkapi strategi program gizi tersebut, pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk membuat dan mendistribusikan pangan bergizi dengan harga terjangkau. Program jaring pengaman sosial dan program pencegahan gizi juga dapat berperan penting dalam merangsang sektor swasta untuk memproduksi makanan bergizi yang sesuai standar internasional yang dirancang khusus untuk kelompok rentan. Selain itu, perlunya menambahkan komponen gizi ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya dalam bentuk kupon gizi untuk membantu memberikan insentif untuk gizi yang baik bagi rumah tangga miskin.

Perubahan iklim

Perubahan iklim tetap menjadi ancaman besar bagi ketahanan pangan dan gizi, terutama bagi rumah tangga yang mata pencahariannya bergantung pada produksi pertanian. Mengingat iklim makin tidak menentu, antisipasi dampak perubahan iklim seperti penyimpangan curah hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas perubahan iklim, peningkatan resiko hama tanaman yang berdampak negatif ke petani,membuat sulit bagi para petani untuk memperkirakan kalender pertanian. Hal ini berdampak pada rendahnya produksi dan produktifitas tanaman yang pada akhirnya akan mengganggu mata pencaharian petani secara keseluruhan.

Kota Payakumbu juga harus siap dan selalu waspada menghadapi bencana, tidak hanya dalam skala besar dan tiba-tiba (*sudden onset*) tapi juga bencana yang dapat diprediksi (*slow onset*) yang terkait dengan perubahan iklim. Misalnya, kekeringan, banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh curah hujan ekstrim yang berdampak terhadap memburuknya kerawanan pangan yang ada, sehingga membutuhkan tanggap darurat yang menyerap sumber daya keuangan dan sumber daya manusia baik di tingkat lokal maupun di tingkat provinsi.

Keberlanjutan pasokan air dan jasa lingkungan lainnya merupakan hal penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam beradaptasi dengan

perubahan iklim. Pengelolaan air dapat diperkuat melalui peningkatan perencanaan tata ruang dan sistem penggunaan lahan, pengelolaan konservasi dan kawasan ekosistem penting, rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi, dan percepatanpembangunan serta rehabilitasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pertanian (termasuk irigasi, bendungan, dam) dengan menggunakan teknologi iklim yang sudah terbukti. Peluang lainnya termasuk meningkatkan sistem peringatan dini untuk bencana yang terprediksi (*slow-onset*) dan mendadak (*sudden-onset*) terkait dengan perubahan iklim, menciptakan program insentif untuk penelitian dan pengembangan daya tahan tanaman terhadap kondisi iklim dan hama tanaman yang baru.

Akses ekonomi, dampak gizi dan sensitifitas terhadap perubahan iklim merupakan 3 faktor utama yang mempengaruhi pencapaian ketahanan pangan dan gizi di Payakumbuh. Dengan kondisi seperti sekarang ini, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian iklim, maka Payakumbuh akan menghadapi tantangan yang besar. Hal ini membutuhkan program-program pemerintah yang lebih fokus pada pengurangan kemiskinan, program gizi-sensitif, diversifikasi pangan dan strategi adaptasi iklim. Melalui peningkatan dialog dan koordinasi lintas sektor, serta lebih banyak pada upaya untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya sektor publik dan swasta, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, setara, sejahtera dan tahan terhadap dampak yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana lainnya.

Implikasi kebijakan

Untuk menjawab 3 (tiga) tantangan diatas yaitu akses ekonomi, gizi dan iklim, maka Pemerintah Kota Payakumbuh perlu untuk melakukan:

1 Untuk menjawab masalah kekurangan gizi (*undernutrition*), maka pemerintah perlu melakukanpenyesuaian arah dan fokus kebijakan dari ketahanan pangan menuju Ketahanan Pangan dan Gizi, terutama di kecamatan-kecamatan atau nagari yang rentan atas kondisi rawan pangan. Pemerintah sebaiknya melakukan kaji ulang fokus pangan pokok, seperti dengan memasukkan pangan pokok lokal (umbi-umbian, jagung konsumsi, ikan, sayuran, buah lokal).

2 Pemerintah Kota Payakumbuh dapat melakukan integrasi kebijakan pangan dan gizi, seperti: kebijakan pertanian sensitif gizi dan kesehatan, kebijakan gizi dan kesehatan berbasis pangan lokal, kebijakan perdagangan dan industri sensitif pangan dan gizi.

3 Dukungan dari tingkat nasional, Pemerintah Pusat dapat melakukan sistem

pangan terpadu, melalui:

a. Pendekatan multi dimensi; (i) meningkatkan produksi pangan primer; (ii) mengurangi kehilangan pasca panen dan konsumsi; (iii) pengembangan budaya konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman.
b. Pengembangan sistem pertanian ekologis multi komoditas, seperti Integrasi Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Ternak Ikan Perhutanan.
c. Pengembangan rantai pasok pangan berbasis IPTEK dan sensitif gizi.
d. Mengkampanyekan stop boros pangan secara massif kepada masyarakat terhadap pola makan yang baik dan tidak berlebihan, mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan saja sehingga dapat mengurangi sisa makanan (loss food).

Tantangan ketahanan pangan

Di Kota Payakumbuh, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan utama bagi ketahanan pangan, diantaranya adalah:

- Laju pertumbuhan penduduk dalam empat tahun terakhir yaitu tahun 2020 ke 2024 mencapai 1,37 persen (BPS, 2025), sementara pertumbuhan produksi tanaman holtikultura dalam lima tahun terakhir mencapai-11,62 persen untuk padi dan -6,63 persen untuk jagung. Walaupun demikian, fluktuasi curah hujan dan terus berkurangnya lahan pertanian yang tersedia merupakan faktor risiko utama.

- Konversi dari lahan pertanian menjadi non-pertanian juga merupakan suatu hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah. Walaupun dalam lima tahun terakhir terjadi perubahan signifikan terkait jumlah lahan pertanian, namun tingginya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal serta ke butuhan lahan untuk perumahan dapat mengurangi luasan lahan pertanian dari tahun ke tahun.

- Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023, sebanyak 82,98 persen petani di Kota Payakumbuh merupakan petani gurem, yaitu petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Dengan luas lahan usaha tani seperti ini, meski produktivitas per luas lahan tinggi tetap merupakan tantangan besar bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mengamankan produksi padi/beras untuk mendukung ketahanan pangan daerah, dan peningkatan daya saing komoditas pertanian.

- Faktor lain yang terus menjadi penghambat pengembangan dibidang pertanian adalah:

- Menurunnya daya dukung sumber daya alam, lingkungan yang dieksploitasi berlebihan, anomaliiklim dan, degradasi lahan.
- Belum optimalnya infrastruktur pertanian.
- Tingkat kehilangan hasil (*losses*) yang masih cukup tinggi dan masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor.
- Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usaha tani.
- Belum optimalnya kelembagaan petani.
- Relatif terbatasnya tingkat pendidikan petani.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, Kota Payakumbuh dalam Angka 2025

Badan Pusat Statistik, Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023

Badan Pangan Nasional. Petunjuk Teknis Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan 2025

Suryana, A. 2014. Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2.:123-135

Dinas Sosial, Kota Payakumbuh. Persentase angka kemiskinan tahun 2024

Dinas Pertanian, Kota Payakumbuh. Persentase Produksi Tanaman Padi dan Jagung 5 tahun terakhir.

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

LAMPIRAN

WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
Nomor : 500.1.2 /20-6.497/WAK-PKE/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa peta ketahanan dan kerentanan pangan merupakan sarana informasi mengenai situasi ketahanan dan kerentanan pangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan dibidang pangan, termasuk pengendalian kerawanan pangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 201 Tahun 2025 tanggal 8 Mei 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025.

KEDUA : Tim Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Ketua	:	Kepala Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan
Anggota Tim : Pangan
: 1. Hella Citra, SST, M.Si/ Statistisi, Badan Pusat Statistik
2. Despriyani, Str Keb/Administrasi Kesehatan Madya Dinas Kesehatan
3. Junaidi, S.Kom,.M.Si/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Davit Putra, ST., M.Eng/ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Vinna Agustia, SP/ Analisis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
6. Hendri, SP/ Analisis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
7. Indah Lovesianda, SKM/ Analisis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
8. Zhoraiya Mukhlisa, A.Md/ Pengolah data dan Informasi Dinas Ketahanan Pangan

KETIGA : Tim Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025 mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut :

1. Penanggung jawab
   bertanggungjawab atas pelaksanaan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025.
2. Ketua
   a. mengkoordinir Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025.
   b. berkoordinasi dengan instansi terkait untuk Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025.
3. Sekretaris
   membantu ketua untuk melaksanakan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025.

4. Anggota
   a. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis penyusunan sesuai prosedur dan ketentuan berlaku.
   b. Menyiapkan dan mengolah data menggunakan aplikasi sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
   c. menyusun analisis data dan mengidentifikasi permasalahan serta solusi pemecahan masalah
   d. membuat laporan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor Rekening. 2.09.04.2.01.0001.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 25 Juni 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA

Tembusan:
1. Sdr. Kepala BPS Kota Payakumbuh
2. Sdr. Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh
3. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh di Payakumbuh
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh di Payakumbuh
5. Sdr. Kepala Bappeda Kota Payakumbuh
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
7. Yang bersangkutan

WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
Nomor :500.1.2/20.8.584/WK-PYK/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR : 500.1.2/20.6.497/WK-PYK/2025 TENTANG TIM PEMBENTUKAN PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa peta ketahanan dan kerentanan pangan merupakan sarana informasi mengenai situasi ketahanan dan kerentanan pangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan dibidang pangan, termasuk pengendalian kerawanan pangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan evaluasi perlu dilakukan penambahan tim untuk percepatan dan kelancaran tugas Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025 yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor 500.1.2/20.6.497/WK-PYK/2025, tanggal 25 Juni 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 500.1.2/20.6.497/Wk-Pyk/2025 Tentang Tim Pembentukan Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 201 Tahun 2025 tanggal 8 Mei 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 500.1.2/20.6.497/Wk-Pyk/2025 Tentang Tim Pembentukan Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah menambahkan anggota tim yaitu sebagai berikut:

1. Hendra Eriko, SH/ Kepala Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
2. Lily Rachma Diana, S.TP/ Analisis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
3. Yanti Deswita, SP/ Analisis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
4. Erni Yunita, SP/ Penata Layanan Operasional Dinas Ketahanan Pangan

KETIGA : Tim Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025 mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut :

b. Penanggung jawab
bertanggungjawab atas pelaksanaan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025.

c. Ketua
   1. mengkoordinir Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025.
   2. berkoordinasi dengan instansi terkait untuk Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025.

d. Sekretaris
membantu ketua untuk melaksanakan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025.

e. Anggota
   1. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis penyusunan sesuai prosedur dan ketentuan berlaku.
   2. Menyiapkan dan mengolah data menggunakan aplikasi sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
   3. menyusun analisis data dan mengidentifikasi permasalahan serta solusi pemecahan masalah
   4. membuat laporan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kegiatan Penyusunan Peta

Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor Rekening. 2.09.04.2.01.0001.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 agustus 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA

Tembusan:
1. Sdr. Kepala BPS Kota Payakumbuh
2. Sdr. Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh
3. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh di Payakumbuh
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh di Payakumbuh
5. Sdr. Kepala Bappeda Kota Payakumbuh
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
7. Yang bersangkutan

WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
Nomor : 500.1.1/20.10.866/WK-PTK/2025

TENTANG
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota;

b. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pangan,serta untuk penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di bidang pangan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977)
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 201 Tahun 2025 tanggal 8 Mei 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025;

2. Berita Acara Penetapan Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh oleh Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025 Nomor 500.1.2.3/341DKP-PYK/2025 Tanggal 14 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025.

KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana

dimaksud diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 6 Desember 2024

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMALTA

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Inspektur Kota Payakumbuh
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
3. Sdr. Kepala Bappeda Kota Payakumbuh
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh
6. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jl. Jambu Kel Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kec. Payakumbuh Utara
Email: ketahananpangan.payakumbuh@gmail.com

BERITA ACARA
PENETAPAN HASIL PENYUSUNAN
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN TAHUN 2025
Nomor : 500.1.2.3/ 341 /DKP-PYK/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Telah dilaksanakan rapat/pertemuan tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Payakumbuh Tahun 2025 bertempat di Aula Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dan telah menetapkan Hasil pengolahan data berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebagai berikut :

Wilayah	Prioritas	Jumlah Wilayah	Nama Kelurahan	Nama Kecamatan	Keterangan Warna
Sangat Rentan	Prioritas 1	0			
Rentan	Prioritas 2	0			
Agak Rentan	Prioritas 3	6	1. Talang 2. Balai Jaring 3. Napar 4. Taratak Padang Kampuang 5. Tigo Koto Diate 6. Parambahan	1. Payakumbuh Barat 2. Payakumbuh Timur 3. Payakumbuh Utara 4. Payakumbuh Utara 5. Payakumbuh Utara 6. Lamposi Tigo Nagori	
Agak Tahan	Prioritas 4	30	1. Kubu Gadang 2. Bulakan Balai Kandi 3. Tanjung Pauh 4. Labuah Basilang 5. Parik Rantang 6. Payolansek 7. Subarang Batuang 8. Koto Tangah 9. Nunang Daya Bangun 10. Padang Tinggi Piliang	1. Payakumbuh Barat 2. Payakumbuh Barat 3. Payakumbuh Barat 4. Payakumbuh Barat 5. Payakumbuh Barat 6. Payakumbuh Barat 7. Payakumbuh Barat 8. Payakumbuh Barat 9. Payakumbuh Barat 10. Payakumbuh Barat	

			11. Padang Data Tanah Mati	11. Payakumbuh Barat	
			12. Balai Panjang	12. Payakumbuh Selatan	
			13. Koto Tuo Limo Kampuang	13. Payakumbuh Selatan	
			14. Kapalo Koto Ampangan	14. Payakumbuh Selatan	
			15. Padang Tangah Payobada	15. Payakumbuh Timur	
			16. Payobasuang	16. Payakumbuh Timur	
			17. Koto Panjang	17. Payakumbuh Timur	
			18. Koto Baru	18. Payakumbuh Timur	
			19. Padang Alai Bodi	19. Payakumbuh Timur	
			20. Ompang Tanah Sirah	20. Payakumbuh Utara	
			21. Tigo Koto Dibaruah	21. Payakumbuh Utara	
			22. Kapalo Koto Dibalai	22. Payakumbuh Utara	
			23. Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	23. Payakumbuh Utara	
			24. Balai Tangah Koto	24. Payakumbuh Utara	
			25. Ikua Koto Dibalai	25. Payakumbuh Utara	
			26. Koto Panjang Padang	26. Lamposi Tigo Nagori	
			27. Koto Panjang Dalam	27. Lamposi Tigo Nagori	
			28. Padang Sikabu	28. Lamposi Tigo Nagori	
			29. Parik Muko Aia	29. Lamposi Tigo Nagori	
			30. Sungai Durian	30. Lamposi Tigo Nagori	
Tahan	Prioritas 5	11	1. Pakan Sinayan	1. Payakumbuh Barat	
			2. Ibuah	2. Payakumbuh Barat	
			3. Parak Batuang	3. Payakumbuh Barat	
			4. Padang Tongah Balai Nanduo	4. Payakumbuh Barat	
			5. Tanjung Godang Sungai Pinago	5. Payakumbuh Barat	
			6. Limbukan	6. Payakumbuh Selatan	
			7. Padang Karambia	7. Payakumbuh Selatan	
			8. Sawah Padang Aua Kuniang	8. Payakumbuh Selatan	

			9. Padang Tiakar 10. Sicincin 11. Tiakar	9. Payakumbuh Timur 10. Payakumbuh Timur 11. Payakumbuh Timur	
Sangat Tahan	Prioritas 6	0			

Payakumbuh, tanggal bulan dan tahun tersebut diatas

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Edvidel Arda, S.IP, MM	Penanggung Jawab	1
2. Amiruddin, S.Sos.MM	Ketua	2
3. Roza Aulia, S.STP, M.Si	Sekretaris	3
4. Hella Citra, SST,M.Si	Anggota	4
5. Despriyani, Str.Keb	Anggota	5
6. Junaidi, S.Kom,M.Si	Anggota	6
7. Davit Putra, ST, M.Eng	Anggota	7
8. Hendra Eriko, SH	Anggota	8
9. Hendri, SP	Anggota	9
10.Vinna Agustia, SP	Anggota	10
11. Indah Lovesianda, SKM	Anggota	11
12. Lily Rachma Diana, SP	Anggota	12
13. Yanti Deswita, SP	Anggota	13
14. Zhoraiya Mukhlisa, A.Md	Anggota	14
15. Erni Yunita, SP	Anggota	15

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1002	PAKAN SINAYAN	0	5	5	4	6	4	71,10	5	5
2	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1003	KUBU GADANG	0	3	3	4	6	4	58,95	27	4
3	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1004	BULAKAN BALAI KANDI	0	2	4	4	6	5	59,70	26	4
4	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1022	TANJUANG PAUAH	0	1	6	4	6	4	61,23	22	4
5	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1021	IBUAH	0	6	2	4	6	6	80,90	1	5
6	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1020	LABUAH BASILANG	0	4	5	4	6	6	64,55	13	4
7	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1017	PARAK BATUANG	0	6	1	4	6	6	67,00	9	5
8	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1016	PARIK RANTANG	0	3	1	4	6	6	55,48	36	4
9	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1005	PAYOLANSEK	0	3	3	4	6	4	55,34	37	4
10	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1013	SUBARANG BATUANG	0	2	5	4	6	6	61,15	23	4
11	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1011	KOTO TANGAH	0	3	5	4	6	5	62,48	18	4
12	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1007	TALANG	0	1	2	4	6	4	51,42	44	3
13	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1018	NUNANG DAYA BANGUN	0	4	3	4	6	6	58,71	29	4
14	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1009	PADANG TINGGI PILIANG	0	1	4	4	6	5	54,77	39	4
15	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1033	PADANGTONGAH BALAINANC	0	4	6	4	6	6	71,46	4	5
16	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1032	TANJUANGGODANG SUNGAIF	0	5	6	4	6	5	75,32	3	5
17	PAYAKUMBUH BARAT	1376010	13.76.01.1034	PADANGDATA TANAHMATI	0	3	1	4	6	4	54,73	40	4
18	PAYAKUMBUH SELAT	1376011	13.76.05.1005	BALAI PANJANG	0	4	3	4	6	4	61,76	20	4
19	PAYAKUMBUH SELAT	1376011	13.76.05.1003	LIMBUKAN	0	3	6	4	6	4	66,77	10	5
20	PAYAKUMBUH SELAT	1376011	13.76.05.1001	PADANG KARAMBIA	0	4	5	4	6	4	68,55	7	5
21	PAYAKUMBUH SELAT	1376011	13.76.05.1002	KOTOTUO LIMOKAMPUANG	0	3	4	4	6	4	63,68	16	4
22	PAYAKUMBUH SELAT	1376011	13.76.05.1006	KAPALO KOTO AMPANGAN	0	4	3	4	6	4	56,79	32	4
23	PAYAKUMBUH SELAT	1376011	13.76.05.1010	SAWAHPADANG AUA KUNIAN	0	4	5	4	6	4	66,67	11	5
24	PAYAKUMBUH TIMUI	1376020	13.76.03.1003	PADANG TANGAH PAYOBADA	0	3	6	4	6	4	63,66	17	4
25	PAYAKUMBUH TIMUI	1376020	13.76.03.1001	BALAI JARING	0	1	3	4	6	4	50,30	47	3
26	PAYAKUMBUH TIMUI	1376020	13.76.03.1009	PAYOBASUNG	0	4	4	4	6	3	65,82	12	4
27	PAYAKUMBUH TIMUI	1376020	13.76.03.1010	KOTO PANJANG	0	5	3	4	6	3	63,88	15	4
28	PAYAKUMBUH TIMUI	1376020	13.76.03.1011	KOTO BARU	0	5	1	4	6	4	62,12	19	4
29	PAYAKUMBUH TIMUI	1376020	13.76.03.1002	PADANG ALAI BODI	0	4	2	4	6	3	56,69	33	4
30	PAYAKUMBUH TIMUI	1376020	13.76.03.1007	PADANG TIAKAR	0	5	4	4	6	4	68,98	6	5
31	PAYAKUMBUH TIMUI	1376020	13.76.03.1005	SICINCIN	0	6	3	4	6	5	67,85	8	5
32	PAYAKUMBUH TIMUI	1376020	13.76.03.1015	TIAKAR	0	6	4	4	6	4	79,04	2	5
33	PAYAKUMBUH UTARA	1376030	13.76.02.1002	NAPAR	0	3	2	4	6	6	52,86	43	3
34	PAYAKUMBUH UTARA	1376030	13.76.02.1032	OMPANG TANAH SIRAH	0	3	4	4	6	3	57,22	31	4
35	PAYAKUMBUH UTARA	1376030	13.76.02.1033	TARATAK PADANG KAMPUAN	0	1	1	4	6	4	51,21	45	3
36	PAYAKUMBUH UTARA	1376030	13.76.02.1034	TIGO KOTO DIBARUAH	0	2	4	4	6	4	55,89	35	4
37	PAYAKUMBUH UTARA	1376030	13.76.02.1035	TIGO KOTO DIATE	0	3	3	4	6	4	53,74	42	3
38	PAYAKUMBUH UTARA	1376030	13.76.02.1038	KAPALO KOTO DIBALAI	0	3	4	4	6	6	60,60	24	4
39	PAYAKUMBUH UTARA	1376030	13.76.02.1039	KOTOKOCIAK KUBU TAPAKRA	0	3	6	4	6	5	64,13	14	4
40	PAYAKUMBUH UTARA	1376030	13.76.02.1037	BALAI TONGAH KOTO	0	3	2	4	6	6	54,57	41	4
41	PAYAKUMBUH UTARA	1376030	13.76.02.1036	IKUA KOTO DIBALAI	0	3	5	4	6	4	61,62	21	4
42	LAMPOSI TIGO NAGO	1376031	13.76.04.1005	KOTO PANJANG PADANG	0	3	2	4	6	5	55,93	34	4
43	LAMPOSI TIGO NAGO	1376031	13.76.04.1006	KOTO PANJANG DALAM	0	3	1	4	6	5	55,12	38	4
44	LAMPOSI TIGO NAGO	1376031	13.76.04.1003	PARAMBAHAN	0	1	1	4	6	4	50,92	46	3
45	LAMPOSI TIGO NAGO	1376031	13.76.04.1004	PADANG SIKABU	0	3	4	4	6	4	59,93	25	4
46	LAMPOSI TIGO NAGO	1376031	13.76.04.1002	PARIT MUKO AIE	0	4	1	4	6	4	58,41	30	4
47	LAMPOSI TIGO NAGO	1376031	13.76.04.1001	SUNGAI DURIAN	0	4	2	4	6	4	58,85	28	4

PETA KERENTANAN & KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

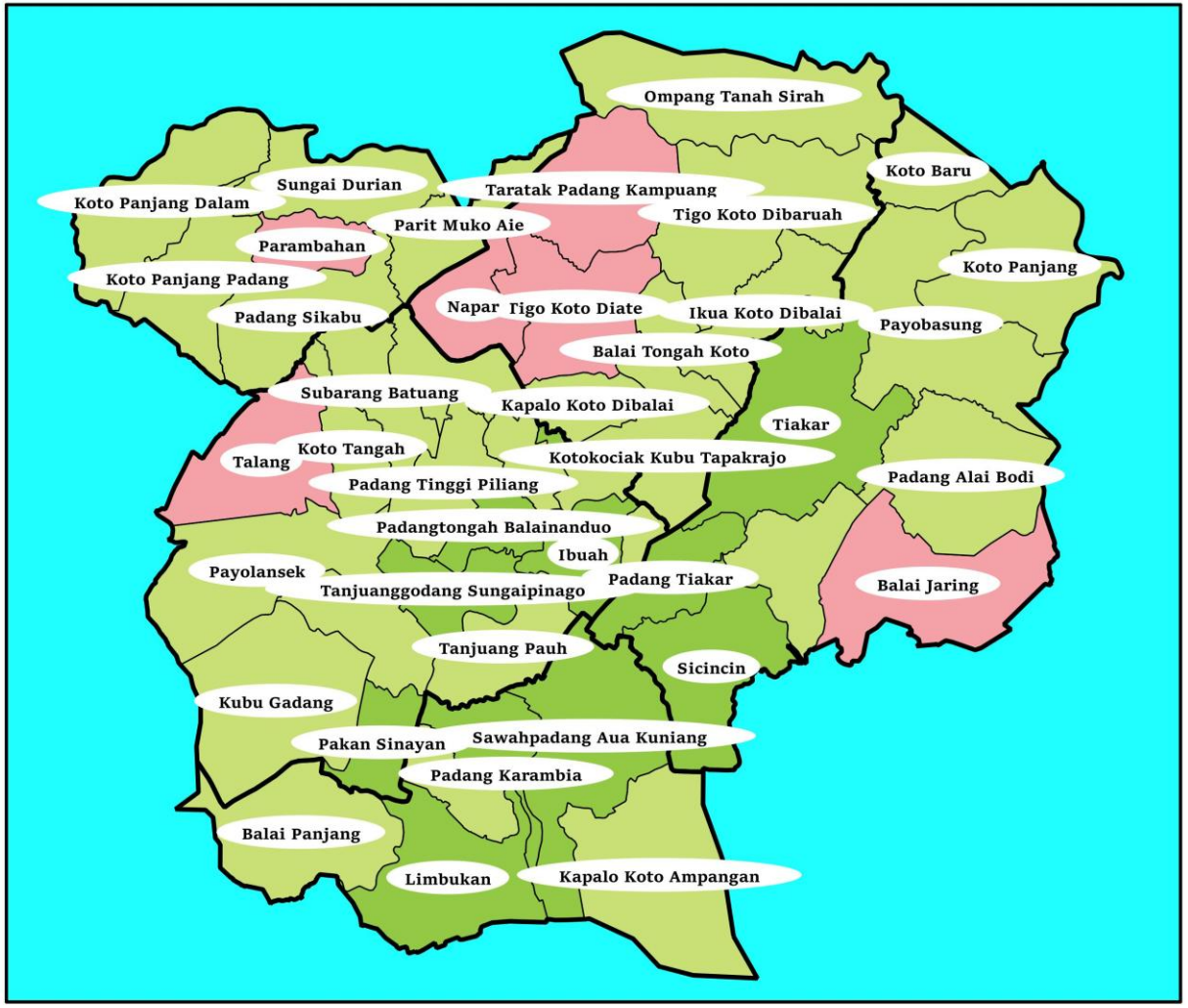

PETA KERENTANAN DAN KERAWANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

N

Legenda

- Prioritas 1
- Prioritas 2
- Prioritas 3
- Prioritas 4
- Prioritas 5
- Prioritas 6

DIOLAH OLEH
DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH

PETA KERENTANAN & KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

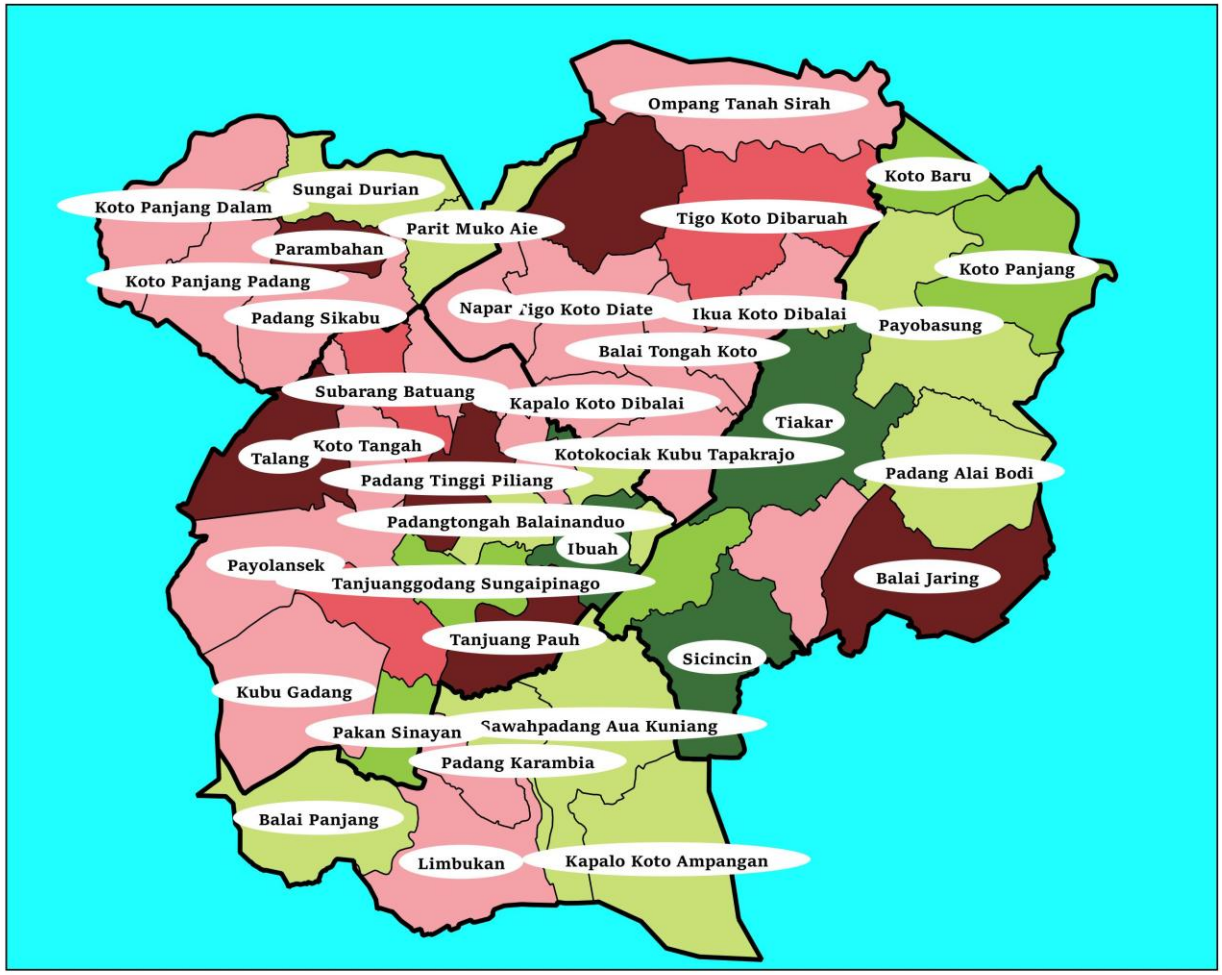

PETA INDIKATOR KETERSEDIAAN JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

N

Legenda

- Prioritas 1
- Prioritas 2
- Prioritas 3
- Prioritas 4
- Prioritas 5
- Prioritas 6

DIOLAH OLEH
DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH

Badan Pangan Nasional

PETA KERENTANAN & KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

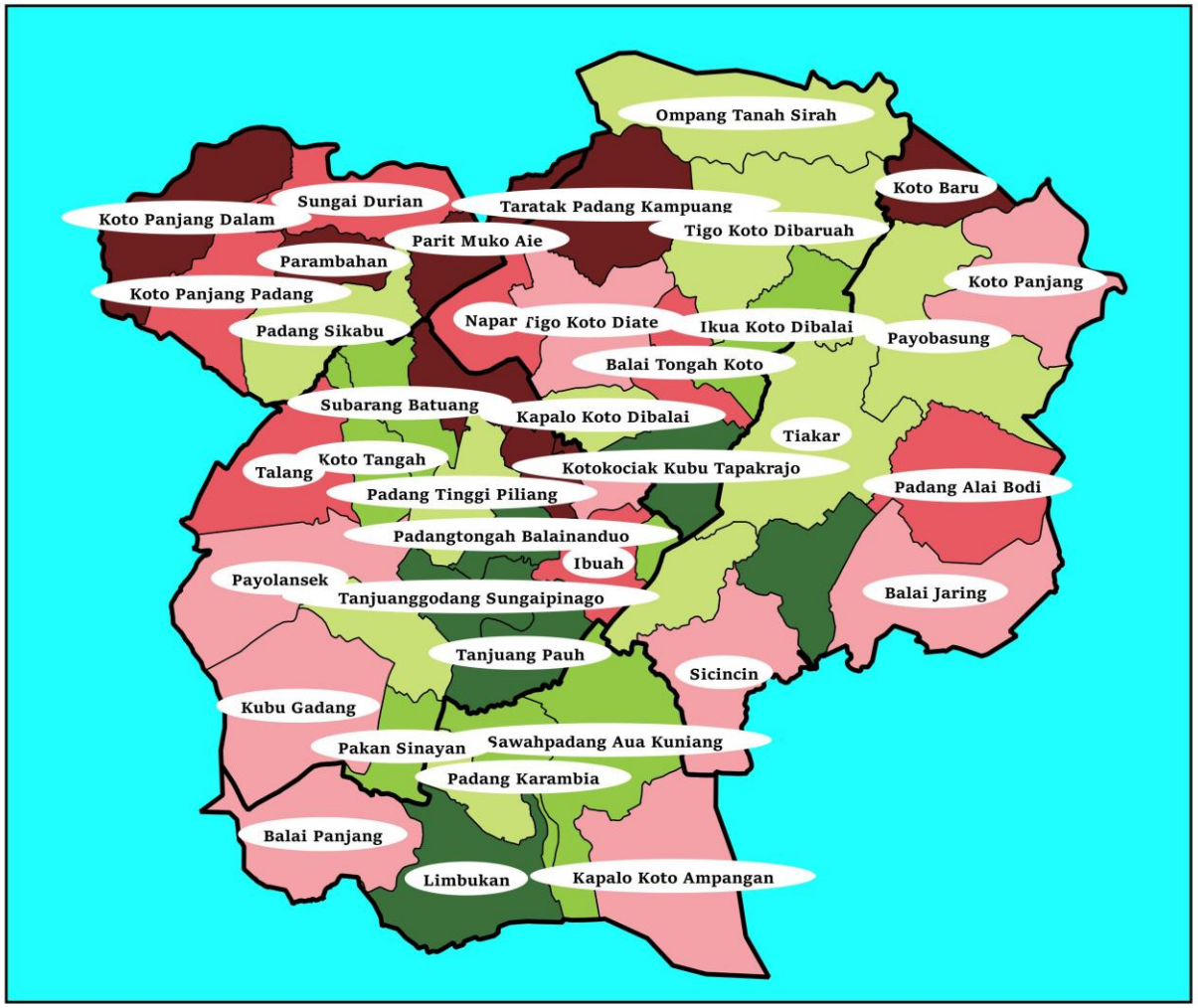

PETA INDIKATOR JUMLAH PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

N

Legenda

- Prioritas 1
- Prioritas 2
- Prioritas 3
- Prioritas 4
- Prioritas 5
- Prioritas 6

DIOLAH OLEH
DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH

PETA KERENTANAN & KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

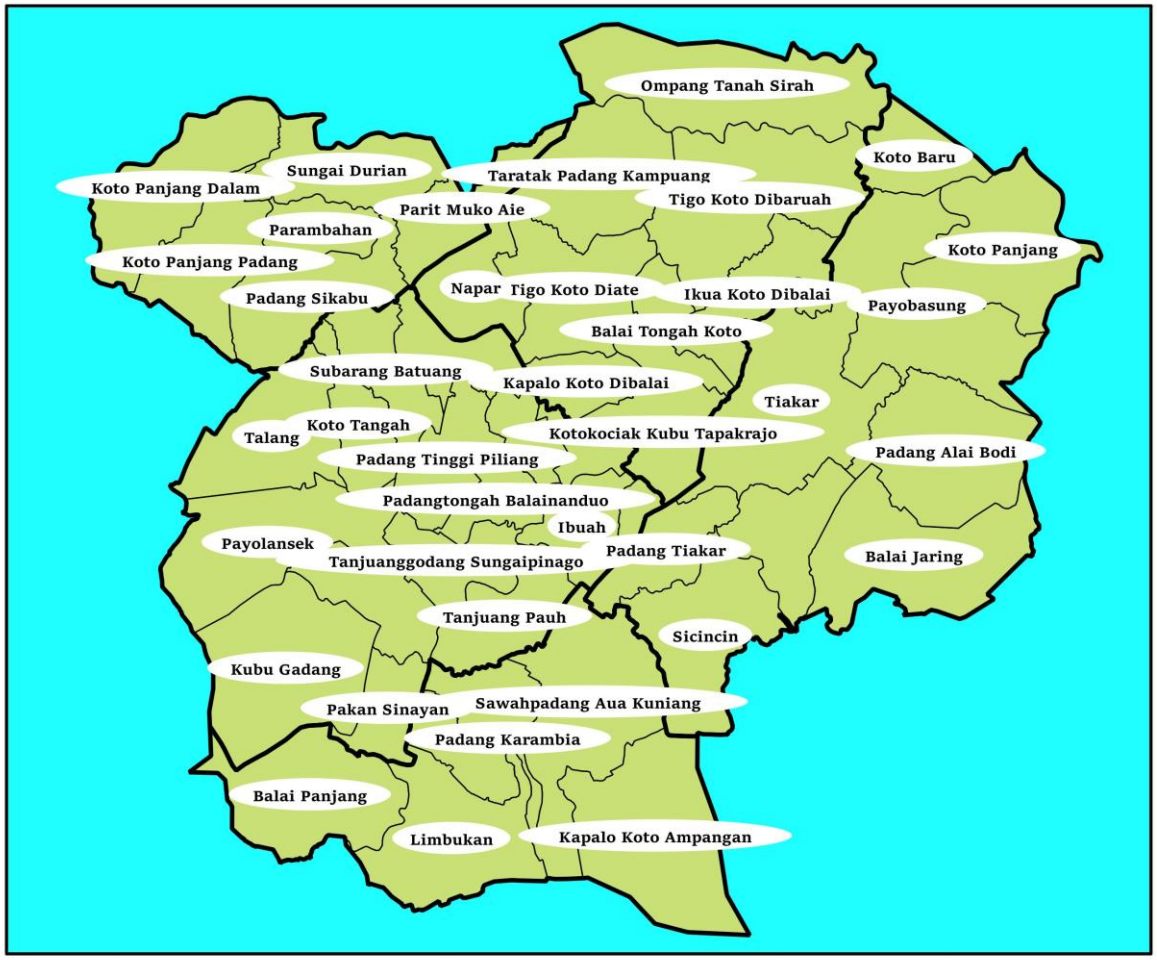

PETA INDIKATOR AKSES PANGAN KELURAHAN TANPA AKSES PENGHUBUNG MEMADAI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

N

Legenda

- Prioritas 1
- Prioritas 2
- Prioritas 3
- Prioritas 4
- Prioritas 5
- Prioritas 6

DIOLAH OLEH
DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH

PETA KERENTANAN & KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

PETA INDIKATOR PEMANFAATAN JUMLAH RUMAH TANGGA TANPA AKSES AIR BERSIH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

N

Legenda

- Prioritas 1
- Prioritas 2
- Prioritas 3
- Prioritas 4
- Prioritas 5
- Prioritas 6

DIOLAH OLEH
DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH

Badan Pangan Nasional

PETA KERENTANAN & KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

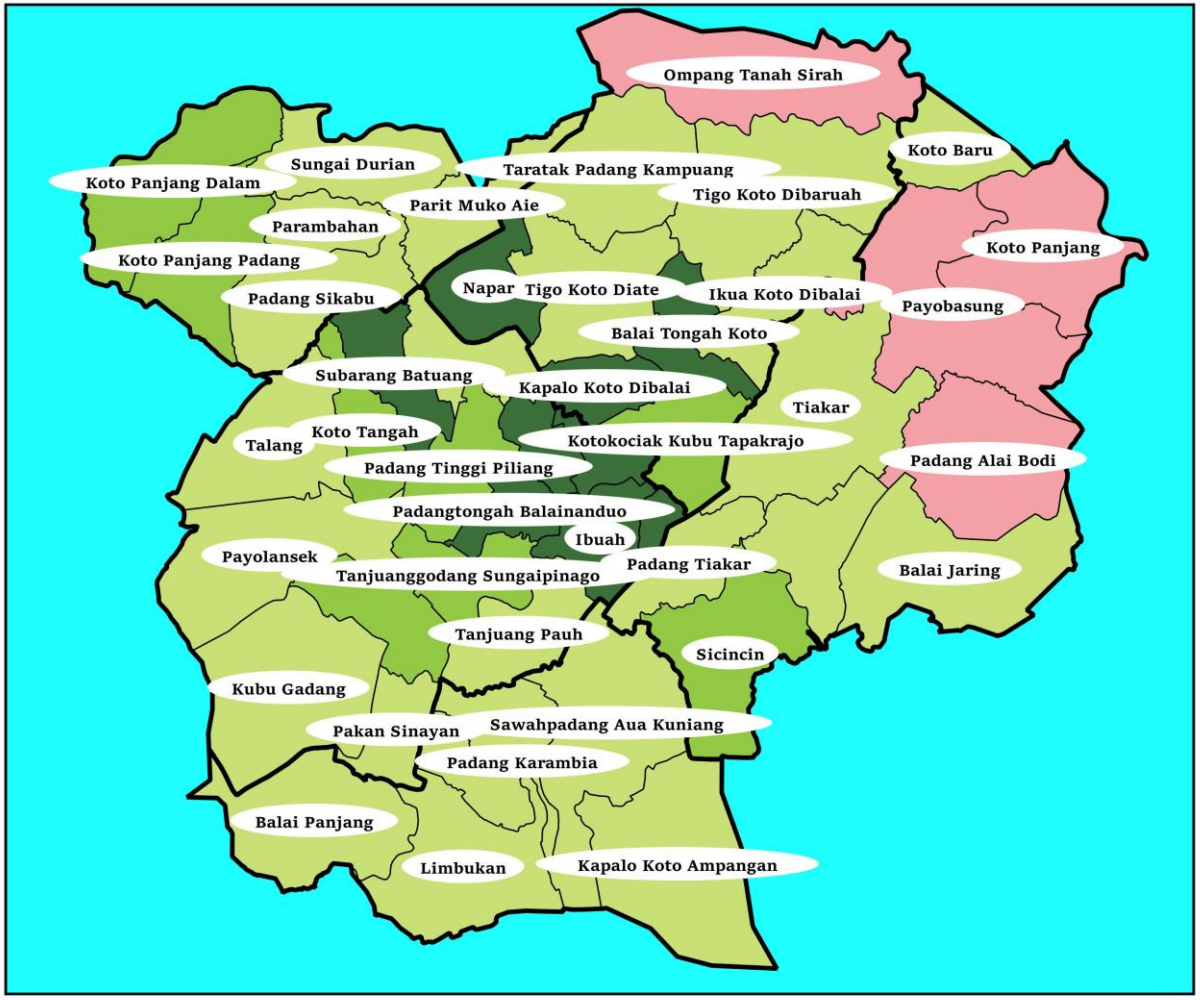

PETA INDIKATOR PEMANFAATAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

N

Legenda

- Prioritas 1
- Prioritas 2
- Prioritas 3
- Prioritas 4
- Prioritas 5
- Prioritas 6

DIOLAH OLEH
DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH

SARANA PRASARANA EKONOMI PER KELURAHAN DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

NO	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA	KELOMPOK PERTOKOAN	PASAR BANGUNAN PERMANEN	PASAR BANGUNAN SEMI PERMANEN	PASAR TANPA BANGUNAN	MINIMARKET /SWALAYAN	RESTORAN/ RUMAH MAKAN	WARUNG/ KEDAI MAKANAN MINUMAN	HOTEL	PENGINAPAN: HOSTEL, MOTEL,LOSME N,WISMA	TOKO/WARUN G KELONTONG	TOTAL	Nama Jabatan	Tanda tangan dan stempel
1	KAPALO KOTO DIBALAI	1				3		32		2	34	72		
2	BALAI TONGAH KOTO					1		12			41	54		
3	KOTO KOCIAK KUBU TAPAK RAJO		2			2	1	24	1	1	67	98		
4	TIGO KOTO DIATE		1			2	5	52		1	28	85		

RONAL, S.Sos, MM
NIP. 19720505 200701 1 006

SARANA PRASARANA EKONOMI PER KELURAHAN DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

NO	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA	KELOMPOK PERTOKOAN	PASAR BANGUNAN PERMANEN	PASAR BANGUNAN SEMI PERMANEN	PASAR TANPA BANGUNAN	MINIMARKET /SWALAYAN	RESTORAN/ RUMAH MAKAN	WARUNG/ REMA/ MAKANAN MINUMAN	HOTEL	PENGINAPAN/ HOSTEL, MOTEL,LOSMEN,WISMA	TOKO/WARUNG KELONTONG	TOTAL	Nama Aparatur	Tanda tangan dan stempel
5	TIGO KOTO DIBARUAH					2	2	32	1	1	29	67		
6	OMPANG TANAH SIRAH					2		21		1	27	51		
7	TARATAK PADANG KAMPUANG						1	11			10	22		
8	NAPAR		-	-	-	2	3	23		1	18	47		
9	IKUA KOTO DIBALAI							26		2	31	59		

CAMAT PAYAKUMBUH UTARA

SARANA PRASARANA EKONOMI PER KELURAHAN DI KOTA PA

NO	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT	KELOMPOK PERTOKOAN	PASAR BANGUNAN PERMANEN	PASAR BANGUNAN SEMI PERMANEN	PASAR TANPA BANGUNAN	MINIMARKET /SWALAYAN	RESTORAN/ RUMAH MAKAN	WARUNG/ KEDAI MAKANAN MINUMAN	HOTEL	PENGINAPAN: HOSTEL, MOTEL,LOSMEN,WISMA	TOKO/ WARUNG KELONTONG	TOTAL	Nama Jabatan	Tanda tangan dan stempel
14	NUNANG DAYA BANGUN	3	1			1	3	35		1	40	84		
15	LABUH BASILANG	2				2	2 3	20		1	20	47		KOTA PAYAKUMBUH ...ZMI, SE. NIP. 197... 00501 1007
16	IBUH	2	2			2		52		2	15	75		
17	TANJUNG PAUH					2		19		1	24	46		Sandra Vika, S.Sos, M.Si NIP. 19830523 200803 2001

CAMAT PAYAKUMBUH BARAT

SARANA PRASARANA EKONOMI PER KELURAHAN DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

NO	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT	KELOMPOK PERTOKOAN	PASAR BANGUNAN PERMANEN	PASAR BANGUNAN SEMI PERMANEN	PASAR TANPA BANGUNAN	MINIMARKET /SWALAYAN	RESTORAN/ RUMAH MAKAN	WARUNG/ KEDAI MAKANAN MINUMAN	HOTEL	PENGINAPAN: HOSTEL, MOTEL,LOSMEN,WISMA	TOKO/ WARUNG KELONTONG	TOTAL	Nama Jabatan	Tanda tangan dan stempel
1	PAKAN SINAYAN	1	0	0	0	0	1	35	0	2	19	58	Mis Ayu P. Kasi PM Per-Pu. Sinayan	
2	KUBU GADANG	1	0	0	0	0	0	30	0	0	26	57	Iswarni, SE Kasi Kesit	
3	BULAKAN BALAI KANDI	1	0	0	0	6	1	30	0	0	20	58		
4	TJ GODANG SUNGAI PINAGO	0	0	0	0	5	0	100	0	1	35	141	Sekter	
5	PADANG TANGAH BALAI NAN DUO	2				2	3	51	2		25	85		

SARANA PRASARANA EKONOMI PER KELURAHAN DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

NO	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT	KELOMPOK PERTOKOAN	PASAR BANGUNAN PERMANEN	PASAR BANGUNAN SEMI PERMANEN	PASAR TANPA BANGUNAN	MINIMARKET /SWALAYAN	RESTORAN/ RUMAH MAKAN	WARUNG/ KEDAI MAKANAN MINUMAN	HOTEL	PENGINAPAN: HOSTEL, MOTEL,LOSMEN,WISMA	TOKO/ WARUNG KELONTONG	TOTAL	Nama Jabatan	Tanda tangan dan stempel
6	PAYOLANSEK	1				3	3	50			15	72	Lurah	
7	TALANG					2		30			9	41	Kasi	
8	KOTO TANGAH					3	1	18			20	42		
9	PADANG TINGGI PILIANG	4				2	2	28			17	53		

SARANA PRASARANA EKONOMI PER KELURAHAN DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

NO	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT	KELOMPOK PERTOKOAN	PASAR BANGUNAN PERMANEN	PASAR BANGUNAN SEMI PERMANEN	PASAR TANPA BANGUNAN	MINIMARKET /SWALAYAN	RESTORAN/ RUMAH MAKAN	WARUNG/ KEDAI MAKANAN MINUMAN	HOTEL	PENGINAPAN: HOSTEL, MOTEL,LOSMEN,WISMA	TOKO/ WARUNG KELONTONG	TOTAL	Nama Jabatan	Tanda tangan dan stempel
10	PADANG DATAR TANAH MATI	2				1		21	1		31	56		
11	SUBARANG BATUANG						1	16	1	1	12	31		
12	PARAK BATUANG	3				3	1	18	1	1	16	43		
13	PARIT RANTANG	5				1	3	60		2	38	109		

SARANA PRASARANA EKONOMI PER KELURAHAN DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

NO	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT	KELOMPOK PERTOKOAN	PASAR BANGUNAN PERMANEN	PASAR BANGUNAN SEMI PERMANEN	PASAR TANPA BANGUNAN	MINIMARKET /SWALAYAN	RESTORAN/ RUMAH MAKAN	WARUNG/ KEDAI MAKANAN MINUMAN	HOTEL	PENGINAPAN: HOSTEL, MOTEL,LOSME N,WISMA	TOKO/ WARUNG KELONTONG	TOTAL	Nama Jabatan	Tanda tangan dan stempel
14	NUNANG DAYA BANGUN	3	1			1	3	35		1	40	84		
15	LABUH BASILANG	2				2	2	20		1	20	47		[illegible].MI, SE NIP. 12[illegible]200501 1007
16	IBUH	2	2			2		52		2	15	75		DIAN DIANA LESTARI, A.Md NIP. 19850214 201001 2 009
17	TANJUNG PAUH					2		19		1	24	46		HENDRI YANTO, S.Sos NIP. 19691028 200012 1 003

CAMAT PAYAKUMBUH BARAT

SARANA PRASARANA EKONOMI PER KELURAHAN DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

NO	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	KELOMPOK PERTOKOAN	PASAR BANGUNAN PERMANEN	PASAR BANGUNAN SEMI PERMANEN	PASAR TANPA BANGUNAN	MINIMARKET /SWALAYAN	RESTORAN/ RUMAH MAKAN	WARUNG/ KEDAI MAKANAN MINUMAN	HOTEL	PENGINAPAN: HOSTEL, MOTEL,LOSME N,WISMA	TOKO/WARUN G KELONTONG	TOTAL	Nama Jabatan	Tanda tangan dan Stempel
1	PAYOBASUNG					2		30		3	46	81	SEKLUR	
2	KOTO BARU							30		1	37	68	Lurah	
3	KOTO PANJANG		1				2	23		2	63	91	Lurah	
4	PADANG ALAI BODI						1	17			38	56	Sekcam	
5	BALAI JARING						1	15			11	27	SEKLUR	

SARANA PRASARANA EKONOMI PER KELURAHAN DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

NO	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	KELOMPOK PERTOKOAN	PASAR BANGUNAN PERMANEN	PASAR BANGUNAN SEMI PERMANEN	PASAR TANPA BANGUNAN	MINIMARKET /SWALAYAN	RESTORAN/ RUMAH MAKAN	WARUNG/ KEDAI MAKANAN MINUMAN	HOTEL	PENGINAPAN: HOSTEL, MOTEL,LOSMEN,WISMA	TOKO/WARUNG KELONTONG	TOTAL	Ket	Tanda tangan dan stempel
6	PADANG TANGAH PAYOBADAR	2				1		32			33	68		
7	SICINCIN					2		58	3	2	80	145		
8	TIAKAR					3	2	167		3	173	348		
9	PADANG TIAKAR					1		55	3	4	88	151		

CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

DATA DTSEN DESIL 1 KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

Sumber: DTSEN kondisi 11 Juli 2025

NO	KELURAHAN	DESIL 1 PER KK	DESIL 1 PER JIWA
KEC. PAYAKUMBUH BARAT			
1	BULAKAN BALAI KANDI	54	181
2	IBUAH	105	424
3	KOTO TANGAH	32	101
4	KUBU GADANG	56	181
5	LABUH BASILANG	24	84
6	NUNANG DAYA BANGUN	64	262
7	PADANG DATAR TANAH MATI	81	312
8	PADANG TONGAH BALAI NAN DUO	26	79
9	PADANG TINGGI PILIANG	76	271
10	PAKAN SINAYAN	18	66
11	PARAK BATUANG	33	115
12	PARIK RANTANG	156	561
13	PAYOLANSEK	86	341
14	SUBARANG BATUANG	26	90
15	TALANG	81	312
16	TANJUNG GODANG SUNGAI PINAGO	34	125
17	TANJUNG PAUH	37	123
KEC. PAYAKUMBUH UTARA			
18	BALAI TANGAH KOTO	77	290
19	IKUA KOTO DIBALAI	39	147
20	KAPALO KOTO DIBALAI	64	202
21	KOTO KOCIAK KUBU TAPAK RAJO	52	180
22	NAPAR	72	267
23	OMPANG TANAH SIRAH	52	205
24	TARATAK PADANG KAMPUANG	66	271
25	TIGO KOTO DIATE	119	446
26	TIGO KOTO DIBARUAH	77	306
KEC. PAYAKUMBUH TIMUR			
27	BALAI JARING	57	199
28	KOTO BARU	76	261
29	KOTO PANJANG	57	196
30	PADANG ALAI BODI	67	215
31	PADANG TANGAH PAYOBADAR	41	128
32	PADANG TIAKAR	59	208
33	PAYOBASUNG	46	144
34	SICINCIN	77	279
35	TIAKAR	84	307
LAMPOSI TIGO NAGARI			
36	KOTO PANJANG DALAM	68	256
37	KOTO PANJANG PADANG	48	188
38	PADANG SIKABU	28	124
39	PARAMBAHAN	46	189
40	PARIK MUKO AIA	48	171
41	SUNGAI DURIAN	57	247
KEC. PAYAKUMBUH SELATAN			
42	BALAI PANJANG	35	137
43	KAPALO KOTO AMPANGAN	39	140
44	KOTO TUO LIMO KAMPUANG	13	53
45	LIMBUKAN	13	55
46	PADANG KARAMBIA	16	61
47	SAWAH PADANG AUR KUNING	31	119
TOTAL		2613	9619

Cat: Data ini masih akan terus bergerak / berubah, karena Proses Ground Chek masih terus berlangsung. Sebanyak 2.569 KK (4.981 jiwa) masih belum ada peningkatan desil.

Payakumbuh, 11 Juli 2025

Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh,

IRWAN SUWANDI.SN, S.IP, MM

NIP. 19820328 201001 1 009

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Rky. Rasuna Said No. 43 Payakumbuh Kode Pos : 26231
Telp. (0752) 93947 Fax. (0752) 90810
Email : pupr.payakumbuh@gmail.com Website : https://pupr.payakumbuhkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 621.4/ 650 /PUPR-PYK/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSLIM, ST, M.Si
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP : 19750402 200003 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat

Sehubungan dengan upaya Pemerintah Daerah dalam membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, serta dalam rangka penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kota Payakumbuh, maka untuk data aksessibilitas jalan di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Panjang Jalan Kota (M)	Tingkat Aksessibilitas
1	Payakumbuh Barat	97.129,00	100%
2	Payakumbuh Utara	62.639,00	100%
3	Payakumbuh Timur	65.623,00	100%
4	Payakumbuh Selatan	35.295,00	100%
5	Lamposi Tigo Nagori	34.696,00	100%
	Panjang Total Jalan Kota	**295.382,00**	

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 30 Juli 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

MUSLIM, ST, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19750402 200003 1 005

AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR BERSIH BERKUALITAS (LAYAK) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	PUSKESMAS	KELURAHAN	JUMLAH KK	SUMUR GALI TERLINDUNG	SUMUR GALI DENGAN POMPA	SUMUR BOR DENGAN POMPA	TERMINAL AIR	MATA AIR TERLINDUNG	PENAMPUNGAN AIR HUJAN	DEPOT AIR MINUM	PERPIPAAN (PDAM,BPSPAM)	PERPIPAAN NON PDAM	KK MENUMPANG	JML TOTAL KK	%
					JML KK	JML KK	JML KK	JML KK	JML KK	JML KK	JML KK	JML KK	JML KK			
1	2	3		4												
1	Payakumbuh Barat	Ibuh	Tanjung Gadang Sungai Pinago	993	15						97	881				
			Nunang Daya Bangun	819	2						17	800				
			Padang Tangah Balai Nan Duo	872	1						89	782				
			Labuh Basilang	606	1						16	589				
			Tanjung Pauh	846	38		36				287	485				
			Ibuh	1134	18		6				113	997				
		JUMLAH		5.270	75	0	42	0	0	0	619	4.534	0	0	5.270	100
		Payolansek	Payolansek	1079	15							1.064				
			Bulakan Balai Kandih	997	21							976				
			Koto Tangah	476	5							471				
			Talang	711	12							699				
			Kubu Gadang	492	11							481				
			Pakan Sinayan	697	39							658				
		JUMLAH		4.452	103	0	0	0	0	0	0	4.349	0	0	4.452	100
		Parit Rantang	Parit Rantang	1.618	2							1.616				
			Padangtinggi Pilang	1.195	7							1.188				
			Padangdata Tanahmas	848	0							848				
			Parak Batuang	347	0							347				
			Subarang Batuang	591	1							590				
		JUMLAH		4.599	10	0	0	0	0	0	0	4.589	0	0	4.599	100
		KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT		14.321	188	0	42	0	0	0	619	13.472	0	0	14.321	100
2	Payakumbuh Timur	Air Tabit	Balai Jaring	623	28							559	36			
			Pdg Alai Bodi	548	50							498				
			Pdg Tangah Payobadar	902	55							847				
			Sicincin	966	40							926				
			Padang Tiakar	1056	62							994				
		JUMLAH		4.095	235	0	0	0	0	0	0	3.824	36	0	4.095	100
		Tiakar	Tiakar	1510	110							1.399				
			Payobasung	644	40							603				
			Koto Panjang	641	69							570				
			Koto Baru	498	102							394				
		JUMLAH		3.293	321	0	0	0	0	0	0	2.966	0	6	3.293	100,00
		KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR		7.388	556	0	0	0	0	0	0	6.790	36	6	7.388	100,00

3	Payakumbuh Selatan	Padang Karambia	Kapalo Koto Ampangan	427	0	0						427	0			
			Sawah Padang Air Kuning	678	0	21						657	0			
			Koto Tuo Limo Kampuang	368	0	13						191	164			
			Padang Karambia	277	0	14						263	0			
			Limbukan	749	0	12						677	60			
			Balai Panjang	428	0	58						370	0			
JUMLAH				**2.927**	**0**	**118**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.585**	**224**	**0**	**2.927**	**100,00**
4	Payakumbuh Utara	Tiakar	Kotokocak Kubu Tapakrajo	1.175	77							1.096				
JUMLAH				**1.175**	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.096**	**0**	**2**	**1.175**	**100,00**
		Tarok	Taratak Padang Kampung	319	0							0				
			Ompang Tanah Sirah	824	0							0				
			Ikua Koto Dibalai	1.220	0							0				
			Balai Tangah Koto	664	0							0				
			Tigo Koto Diateh	859	0							0				
			Tigo Koto Dibaruah	1.038	0							0				
JUMLAH (KAB/KOTA)				4.924	35	0	0	0	0	0	0	4.889	0	0	4.924	100,00
		Lampasi	Napar	682	13	0	17	0	0	0	153	499				
			Kapalo Koto Dibalai	917	10	0	6	0	0	0	377	524				
JUMLAH (KAB/KOTA)				**1.599**	**23**	**0**	**23**	**0**	**0**	**0**	**530**	**1.023**		**0**	**1.599**	**100,00**
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA				**7.698**	**135**	**0**	**23**	**0**	**0**	**0**	**530**	**7.008**	**0**	**2**	**7.698**	**100,00**
5	Lampasi Tigo Nagari	Lampasi	Koto Panjang Dalam	626	2	0	15	0	0	0	101	508				
			Koto Panjang Padang	662	4	0	21	0	0	0	102	535				
			Parambahan	325	5	0	19	0	0	0	100	201				
			Padang Sikabu	433	9	0	17	0	0	0	82	325				
			Sungai Durian	652	9	0	19	0	0	0	287	337				
			Parik Muko Aie	336	10	0	11	0	0	0	156	159				
JUMLAH (KAB/KOTA)				**3.034**	**39**	**0**	**102**	**0**	**0**	**0**	**828**	**2.065**			**3.034**	**100,00**
KECAMATAN PAYAKUMBUH LATINA				**3.034**	**39**	**0**	**102**	**0**	**0**	**0**	**828**	**2.065**	**0**	**0**	**3.034**	**100,00**
JUMLAH TOTAL PAYAKUMBUH				**35.368**	**918**	**118**	**167**	**0**	**0**	**0**	**1.977**	**31.920**	**260**	**8**	**35.368**	**100,00**

MENGETAHUI
KABID KESMAS & PL

VIVI LESWARY, SKM, MKM
Nip. 19740822 199403 2 001

PAYAKUMBUH, JANUARI 2025
SUB KOORDINATOR KESLING KESJAOR

SISRI MARYANTI, SKM
19740508 199803 2 007

JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT SE KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

No	Jenis Ketenagaan	RSUD dr.Adnaan WD	RSI Ibnu Sina	RSKIA Sukma Bunda	RSKIA Annisa	Pusk Ibuh	Pusk Parit Rantang	Pusk Payolansek	Pusk Tarok	Pusk Lampasi	Pusk Tiakar	Pusk Air Tabit	Puske Padang Karambia	Kota Payakumbuh
1	Dokter	53	41	23	21	4	4	2	3	3	2	2	2	160
2	DRG	5	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	15
3	Perawat	133	55	14	21	11	4	5	5	5	5	4	4	266
4	Bidan	43	10	13	14	18	9	12	15	22	13	8	8	185
5	Apoteker	13	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	27
6	Pranata laboratorium	15	4	2	4	1	1	2	2	2	1	1	3	38
7	Ahli gizi	12	2	1	0	1	2	2	2	1	1	1	1	26
8	Kesmas	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	5
9	Asisten Apoteker	20	11	2	6	1	1	1	2	1	2	1	2	50
10	Perawat Gigi	6	0	0	0	2	2	2	2	2	1	2	2	21
11	Penata rontgen	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
12	Sanitasi Lingkungan	4	1	0	1	1	1	2	1	1	2	2	0	16
13	Tenaga Kesehatan Lainnya	284	111	37	34	14	18	15	11	19	12	23	12	590

Payakumbuh, 8 Agustus 2025
Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Meizon Satria,S,T,M.S.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP.19710503 200312 1 006

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sudah
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sudah
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum

[illegible]

REKAPAN TPM KOTA PAYAKUMBUH PER AGUSTUS 2025

No	KODE FASKANKES	TANGGAL REGISTRASI	NAMA PM	KATEGORI PM	ALAMAT	KAB/KOTA	PROVINSI	NIKAB	DOKUMEN KOMITMEN
1	13760100060	19/02/2014	Praktik Mandiri Dokter Gigi Ariana Rahmadita	Dokter Gigi	Jl Soekarno Hatta koto nan IV Tj. Gadang Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
2	13760100059	25/04/2025	Adya Dentalhealth Care Cab Payakumbuh	Dokter Gigi	JALAN MAJUMA SAID NO 109 III TIMBAH KEC PAYAKUMBUH TIMUR	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
3	13760100058	23/02/2023	Thanaki Dental Care	Dokter Gigi	Jl. E. Veteran no 35 Bunian Kel. Kapalo Koto Di Balai	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
4	13760100057	06/05/2025	drg. Iga Yolanda	Dokter Gigi	Jl. M. Yamin Koto Selasa Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
5	13760100056	19/10/2023	Wafida Husni, S.Tr.Keb	Bidan	Jl. Prof. M. Yamin No. 83 Kel. Sungai Durian	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
6	13760100055	17/04/2025	drg. Tri Rahmadhani Gusena	Dokter Gigi	Komplek Perumahan Andalusia No.1, Jalan Merpati Padang Kubalaah	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
7	13760100054	15/02/2025	Faresa Dental	Dokter Gigi	Jln. M Yamin No.85, Padang Tiakar	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
8	13760100053	14/01/2025	Praktek Mandiri Dokter Gigi Widianto	Dokter Gigi	Jl. A.Yani No.45	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
9	13760100052	30/01/2025	dr. Defrizal Indra	Dokter	Jln RA Kartini Cubadak Air Kelurahan Tigo Koto Diate	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
10	13760100051	05/08/2024	PRAKTIK MANDIRI BIDAN ARYANTI,S.ST.,Bdn	Bidan	Jl. Imam Bonjol, Kel. Daliakan Balai Kandi	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
11	13760100050	12/01/2025	PRAKTEK MANDIRI DOKTER GIGI DONA JULRIANTI	Dokter Gigi	Jl Soekarno hatta No.71 B Kelurahan Padang Tangah Balai Nan Duo	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
12	13760100049	16/01/2025	Praktik Mandiri dr. Fara Zaujah M.Ked	Dokter	Jl. H. Agus Salim, Kelurahan [illegible]	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada

13	137601100048	27/12/2014	Embun Pagi	Dokter	Jl. Kesehatan No 50, Balai Baru	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
14	137601100047	11/12/2014	Praktik Mandiri Bidan Nurlena	Bidan	Jl. Semarang No. 244 RT 002/RW 002 Kelurahan Padang tengah Balainanduo Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
15	137601100046	11/12/2014	Praktik Mandiri Dokter Bisa Hudaidah	Dokter	Jl. Arisun no 8 Kotokociak Koto Tangah Tigo	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
16	137601100045	21/03/2014	Klinik Anak Bunda	Dokter	Jl. Soekarno Hatta No. 157	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
17	137601100044	20/12/2014	Pratik Mandiri Ola Dental Care	Perawat	Perum. Bani Ngalau Indah, Kel Bala Panjang. Blok G No.4	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
18	137601100043	21/02/2013	Praktek Mandiri dr. Mirnawati	Dokter	Laboratorium Haema Lab, Simpang Benteng, Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
19	137601100042	27/12/2014	PMB SYELVIA ELVINA, AMd.Keb	Bidan	perumahan payobasung asri blok B no 1 kelurahan payobasung kecamatan payakumbuh timur	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
20	137601100041	01/07/2014	Praktek dr. Haru	Dokter	Jl. M. Yamin Aie Tabik, Balai Janiang	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
21	137601100040	29/08/2014	Praktik Bidan Mandiri Mutya Elwima	Bidan	Jln Rasyid Tuher RT/RW 007	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
22	137601100039	21/03/2014	Praktek Mandiri dr. Reza Zeshi Andresia	Dokter	Jln. Bima No. 10 RT. 1 RW. 3 Kelurahan TanjuangGodang SungaiPinago Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, 26225	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
23	137601100038	05/08/2014	Praktek Mandiri dr. Herijon	Dokter	Jl Raflesia no 108	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
24	137601100037	11/07/2014	Praktik Mandiri Bidan Desjanti	Bidan	Jl. Pahlawan No. 24 Labuah Basilang	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
25	137601100036	11/07/2014	Praktik Mandiri dr. Zainab	Dokter	Jl. Kamboja No 5 Kel. Subarang Batuang, Kec. Payakumbuh Barat, Sumbar	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada

26	13760100035	24/04/2024	Praktek Mandiri drg Fenni Yuda	Dokter Gigi	Jl Adinegoro Suryani no 24A kel Koto Katiak Koto Tapak Rajo	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
27	13760100034	17/01/2023	SHELDON	Dokter Gigi	Jl. Imam Bonjol RT 002 RW 004 Kel. Padang Data Tanah Mati	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
28	13760100033	19/03/2024	Praktek Mandiri Dokter Gigi Aldi Muslim	Dokter Gigi	JALAN LDR IMAM BONJOL 14 A RT 002/ RW 001 KELURAHAN LABUH BARU	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
29	13760100032	25/05/2024	Praktek Mandiri dokter gigi yogi aihari	Dokter Gigi	Jalan diponegoro, kelurahan tulang, kecamatan payakumbuh barat	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
30	13760100031	26/05/2024	Praktek mandiri dokter eko	Dokter	Jl Diponegoro, Kelurahan talang, Kecamatan payakumbuh barat, Kota payakumbuh	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
31	13760100030	04/06/2024	Praktek Mandiri dr. Medi	Dokter	Jln Sukarno Hatta, Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago Koto Nan Ampek Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
32	13760100029	03/06/2024	PMB Eva Rahmi	Bidan	Jln H rasuna said no 10 kelurahan tiakar kec payakumbuh timur kota payakumbuh	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
33	13760100028	16/03/2024	Social Dental	Dokter Gigi	Jl. Imam Bonjol Kelurahan Bulakan Balai Kandi	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
34	13760100027	20/02/2023	dokter gigi Ardianingsih dewi	Dokter Gigi	Jalan imam Bonjol No. 20, Kelurahan Bulakan Balai Kandih	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
35	13760100026	20/02/2024	Praktek Mandiri Dokter Gigi Desfa Sandra	Dokter Gigi	Komplek griya asri blok M-3 pakan sinayan kec. Payakumbuh barat kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
36	13760100025	20/02/2024	Praktek Mandiri Dokter Gigi Henni Yeda	Dokter Gigi	Jl Sei Kapalo RT 002/RW 001 Kel Bulakan Balai Kandi Kec Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
37	13760100024	20/02/2024	Praktek Drg. Tirani Marsella Putri	Dokter Gigi	Jl. KH Zainuddin Hamidi RT 01 RW 02 Padang Tinggi Piliang	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
38	13760100023	19/02/2024	Praktek mandiri dokter gigi kumala ardewi	Dokter Gigi	Jl. Tan malaka no 220 RT 001 RW 004 Kel. napar Kec. Payakumbuh Utara kota Payakumbuh 26218	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada

39	[illegible]	20/03/2014	Praktek Mandiri drg. [illegible]	Dokter Gigi	JL.ZAINUDDIN HAMIDI RT.01 RW 01 PADANG TINGGI, Piliang, Kec. Payakumbuh Bar., Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 26221	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
40	[illegible]	[illegible]/2013	Praktik Mandiri dr. Indah Purnama Sari	Dokter	Jln RA Kartini no 15 Nan Kodok Kel Tigo Koto Dibaruah	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	
41	[illegible]	[illegible]/2013	PRAKTIK MANDIRI DOKTER dr. Muhammad Rizlan	Dokter	Padang data Tanah Mati, RT/RW 01/01	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	
42	[illegible]	[illegible]	Praktik Mandiri dr. Iskandar Zulkarnain	Dokter	Jl. M. Yamin No. 12	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	
43	[illegible]	[illegible]	Praktik Mandiri dr. Sri Devarita, Sp.PD	Dokter	Jl. Adinegoro Suryani No. 90 Simpang Benteng	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
44	[illegible]	[illegible]	Praktik Dokter Gigi [illegible]	Dokter Gigi	Jalan Soekarno-Hatta no. 74 Padang Tangah Balai Nan Duo	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
45	[illegible]	[illegible]	Praktek Mandiri drg [illegible]	Dokter Gigi	[illegible] rt 002/003 kel [illegible] kec payakumbuh barat Kota payakumbuh sumatera barat	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	
46	[illegible]	09/11/2012	SENYUM SEHAT DENTAL CARE	Dokter Gigi	Koto, [illegible] Batuo	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
47	[illegible]	[illegible]	[illegible] Dental Care	Dokter Gigi	Jl. [illegible] Kel. [illegible] Kec. Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
48	[illegible]	[illegible]/2013	praktik mandiri drg. [illegible]	Dokter Gigi	Jl. H. Agus Salim, kelurahan Padang Tarok Bulakan?	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
49	[illegible]	[illegible]	drg. [illegible]	Dokter Gigi	Jl. [illegible] Suryani No. 14 A, Kec. Payakumbuh Utara, Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	
50	[illegible]	[illegible]/2012	[illegible] Dental Care	Dokter Gigi	Jl. Soekarno Hatta No.162, Kel. [illegible] Rantang (Apotek [illegible] Farma Smart)	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	
51	[illegible]	[illegible]/2012	[illegible]	Badan	[illegible], Kel. [illegible] Tapak Rajo, Kec. Payakumbuh Utara	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada

52	137601100009	26/02/2022	PRAKTEK MANDIRI BIDAN DIAN WAHYUNI	Bidan	JL. DR. A. DAHLAN NO 1 RT 21 RW 03 LINGKUNGAN TANJUNG ANAU KELURAHAN DAMPANG TANAH SIRAH KOTA PAYAKUMBUH SUMATERA BARAT	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
53	137601100008	26/02/2022	PRAKTIK MANDIRI BIDAN SWARSIWATI	Bidan	Jalan Jenah Cong menjala? no 17 RT 03/RW 03 Kelurahan koto kociak bulbu tapak rajo Kecamatan payakumbuh Utara Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	
54	137601100007	11/02/2022	PRAKTIK MANDIRI dr Aulia Putri Rahmadhani	Dokter	Jl.Bajo Polam kel. tanjuang gadang sungai pinago	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	
55	137601100006	22/02/2022	Praktik Mandiri Dokter Salim Setiawan	Dokter	Jl.Ahmad Yani No 87, RT 003 /RW 002, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	
56	137601100005	14/02/2022	Praktek Mandiri Bidan Yulia Desi Rina,S.Tr.Keb	Bidan	Jalan Setanggi I Kelurahan Kubu Gadang	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	
57	137601100004	08/02/2022	PRAKTIK MANDIRI BIDAN ERLINA FEBRIANTI,S.Tr.Keb	Bidan	PADANG TIAKAR	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	Ada
58	137601100003	13/01/2022	PRAKTIK MANDIRI DOKTER dr. NI MADE DEWY TRISNAWATI, Sp.DV	Dokter	Simpang benteng Jln. Ade Irma Suryani no 2 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	
59	137601100002	24/01/2022	PRAKTIK MANDIRI DOKTER dr. Mery Elvira Theresia	Dokter	Jl. Dewi Sartika, RT 002 RW 002, Kel. Koto Baru	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	
60	137601100001	08/02/2022	PRAKTIK MANDIRI BIDAN NURUL, S. Tr. Keb	Bidan	jln. Kartini, lingkungan cubadak air, kelurahan tigo koto diate, kecamatan payakumbuh utara, kota payakumbuh	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	-	

Plt. Kabid P2SDK

Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Ns. Juli Erlitha, S.Kep

Nip. 19840708 200901 2 001